

GOOD CORPORATE GOVERNANCE MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN

*Studi Terhadap Good Corporate Governance, Manajemen Laba & Kinerja
Keuangan Bank Umum Swasta Nasional Go Public di Bursa Efek
Indonesia*

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

GOOD CORPORATE GOVERNANCE MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN

Sochib, S.E.,M.M., Ak.,CA.





deepublish | publisher

Jl. Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
e-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SOCHIB

Good Corporate Governance Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan
/oleh Sochib.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2016.

x, 98 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN 978-Nomor ISBN

1. Ekonomi

I. Judul

332.1

Hak Cipta 2016, Pada Penulis

Desain cover : Diisi nama
Penata letak : Cinthia Morris Sartono

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Copyright © 2016 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Atas segala karunia dan limpahan rahmat dan hidayat Allah SWT, teriring pula kami selalu memanjatkan puji syukur kehadirat-NYA. Rasanya lega hati penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis sederhana *Good Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan yang merupakan hasil kajian empiris terhadap penerapan *Good Corporate Governance* emiten sektor perbankan yang *go public* di BEI. Dengan menggunakan aplikasi *Structure Equation Modelling* (SEM) dan program *Analysis Moment Of Structures* (AMOS), memberikan analisis yang lebih terperinci.

Pada kesempatan ini penulis ingin sekali menyampaikan ucapan terima kasih atas segala motivasi, informasi, pendapat, gagasan, dan pemikiran yang dapat membuka pikiran penulis kepada: Dr. Gunarianto, SE., MSi,; Dr. Sodik, SE., M.Si., STIE Widya Gama Lumajang . Dengan iringan doa serta kerendahan hati penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan kepada Bapak/Ibu yang telah memotivasi penulis, amin. Khususnya kepada istri tercinta : Willy Untari, dan anak-anak : Zuniarta Putra Wardana, dan Muhammad Zhafran Zhabyansyah. Semoga selalu dalam bimbingan Allah SWT amin.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini masih terlalu kecil, sederhana dan bagian terkecil dari Ilmu Pengetahuan yang lebih besar. Yang besar itu adalah Allah SWT, untuk itulah kritik dan saran demi perbaikan buku ini sangat penulis harapkan.

Lumajang,

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Teori Keagenan	19
2.2 Good Corporate Governance.....	25
2.3 Manajemen Laba.....	36
2.4 Kinerja Keuangan.....	39
2.5 Kajian Penelitian Terdahulu.....	40
2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	42
BAB III	
METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian	45
3.2 Metode Penelitian.....	45
3.3 Operasional Variabel	49
3.4 Instrumen Penelitian	53

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Data Penelitian	57
4.2	Uji Normalitas	60
4.3	Uji Struktural Model	65
4.4	Analisis Pengujian Hipotesis	68
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian	82

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	90
5.2	Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rata-Rata NIM Bank Umum Swasta Nasional Periode 2005 – 2009	10
Gambar 1.2	Rata-Rata Perkembangan LDR Bank Umum Swasta Nasional Periode 2005-2009.....	11
Gambar 1.3.	Perkembangan Rata-Rata ROA Bank Umum Swasta Nasional Periode 2005 - 2009.....	12
Gambar 1.4	Perkembangan Rata-Rata ROE Bank Umum Swasta Nasional Periode 2005 - 2009.....	13
Gambar 1.5.	Perkembangan Rata-Rata BOPO Bank Umum Swasta Nasional Periode 2005 - 2009	14
Gambar 2.1	Struktur Model Hubungan Antar Variabel.....	43
Gambar 4.1	Data Komisaris Independen	58
Gambar 4.2	Data Dewan Komisaris.....	59
Gambar 4.3	Data Komite Audit	60
Gambar 4.4	Model Struktural	65
Gambar 4.5	Hasil Pengujian <i>Covariances Exogenous Variables</i>	70
Gambar 4.6	Hasil Pengujian Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen	76

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1	Skandal Kejahatan Perusahaan di Amerika Serikat	4
Tabel 1.2	Rata-Rata Perkembangan Kinerja Keuangan	9
Tabel 3.2	Operasional Variabel Penelitian	53
Tabel 4.1	Variables Counts	61
Tabel 4.2.	Deskripsi Variabel Penelitian	61
Tabel 4.3.	<i>Assessment of normality</i>	63
Tabel 4.4.	Notes for model	67
Tabel 4.5.	Minimum Descrepancy	67
Tabel 4.6.	<i>Root Mean Residual, Goodness of Fix Index, Adjusted Goodness of Fix Index</i>	68
Tabel 4.7.	Hasil Pengujian <i>Covariances exogenous variables</i>	72
Tabel 4.8.	Hasil Pengujian <i>Correlation Exogenous Variables</i>	73
Tabel 4.9.	Kategori Keeratan Koefisien Korelasi	73
Tabel 4.10.	Hasil Pengujian <i>Regression Weights</i>	75
Tabel 4.11.	Hasil Penguian <i>Standardized Regression Weights</i>	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Liberalisasi dan gejolak *financial market* yang meluas sejak awal tahun 1990 telah meningkatkan persaingan diantara perbankan di hampir seluruh negara. Setidak-tidaknya agar dapat tetap bertahan dan kompetitif, maka perbankan harus dapat memainkan beberapa orientasi baru. Langkah-langkah strategis terhadap orientasi tersebut, menurut Masyhud Ali (2006:335) mengemukakan sebagai berikut : pertama, bank melakukan diversifikasi atas *exposure portofolionya*, sesuai dengan risiko-risiko dan tantangan yang dihadapinya. Kedua, bank melakukan *continous innovation* atas cara yang dilakukannya dalam mengendalikan *business* perbankan sambil disesuaikan dengan risiko-risiko yang terkait didalamnya.

Sementara itu, dengan semakin luasnya orientasi pasar yang diterapkan perbankan tersebut, pendekatan atas penerapan regulasi dan supervisi terhadap industri perbankan juga mengalami perubahan. Tanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan pasar keuangan merambah dari satu negara ke negara lainnya juga telah mengalami redefinisi.

Perubahan ini yang pada akhirnya menegaskan kembali perlunya peningkatan kualitas manajemen perbankan, khususnya yang terkait dengan *risk management process*. Hal itu terutama ditujukan agar diperoleh keyakinan yang kuat bagi tercapainya

aspek keamanan dan stabilitas pada individual bank maupun pada perbankan secara keseluruhan.

Secara khusus, Demsetz et al (1977) mengutip dari Berle dan Means (1932), Jensen dan Meckling (1976), mengemukakan Industri perbankan menekankan pada dua jenis *agency problem* :

*“The banking literature has emphasized to **types of agency problems**. **First**, limited liability gives shareholders an incentive to expropriate wealth from bondholders by increasing risk. Since the financial safety net shields bondholders (particularly depositors) from the consequences of bank risk taking, their incentive to monitor and constrain such risk taking is severely limited. The absence of such monitoring is known as moral hazard or the moral hazard problem associated with deposit insurance in the banking literature. **Second**, absent appropriate monitoring and discipline by shareholders, manager may pursue their own objectives at the expense of shareholders.”*

Literatur perbankan menekankan jenis masalah keagenan. Pertama, kewajiban terbatas memberi pemegang saham insentif untuk mengambil alih kekayaan dari pemegang obligasi dengan meningkatkan risiko. Karena pemegang obligasi perisai jaring pengaman keuangan (terutama depositan) dari konsekuensi pengambilan risiko bank, insentif mereka untuk memantau dan membatasi pengambilan risiko tersebut sangat terbatas. Tidak adanya monitoring tersebut dikenal sebagai moral hazard atau masalah moral hazard terkait dengan asuransi deposito dalam literatur perbankan. Kedua, tidak ada monitoring dan disiplin sesuai dengan pemegang saham, manajer dapat mengejar tujuan mereka sendiri dengan mengorbankan pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan : *We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on*

their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.

Agency theory menjelaskan bahwa terjadinya hubungan keagenan muncul ketika investor sebagai pemilik perusahaan memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajemen. Antara investor dengan manajemen merupakan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen.

Dalam hubungan keagenan semacam ini seringkali menimbulkan konflik yang disebut konflik agensi. Hasil penyelidikan para regulator pemerintah dan analisis kalangan cendekiawan manajemen menyimpulkan bahwa penyebab utama tumbanganya perusahaan-perusahaan besar itu adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* disamping juga karena semakin terpisahnya hubungan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan yang terutama terjadi di negara-negara maju (Masyhud Ali, 2006).

Good Corporate Governance dapat memberikan efektifitas mekanisme yang dapat meminimalkan konflik agensi yang melibatkan manajer. Pemahaman atas pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* mulai meningkat sejak krisis moneter di Asia tahun 1997 dan jatuhnya perusahaan raksasa dunia. Hal itu misalnya terjadi atas *Enron Corporation* dan *World Com* di Amerika Serikat, *HIH Insurance Company Ltd* dan *One Tell Pty Ltd* di Australia serta *Parmalat* di Italia pada awal dekade tahun 2000 (Masyhud Ali, 2006).

Gunarianto (2010:5) mengutip Yulius Jogi Christian (2002:83) dan Agoes (2005:34), mengemukakan kejahatan yang terjadi di perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti tampak pada Tabel 1.1

Tabel.1.1 Skandal Kejahatan Perusahaan di Amerika Serikat

No	Nama Perusahaan	Tuduhan	Isu Kunci
1	Enron Corp	Manipulasi Pembukuan	Dugaan manipulasi yang dilakukan eksekutif Enron melalui lembaga auditornya dapat mendongkrak laba Enron mendekati AS \$1 miliar. Pada hal petinggi Enron hanya menikmati laba semu yang sesungguhnya tidak pernah mereka terima
2	Tyco International	Penggelapan pajak	Mantan CEO Kozlowski dituduh menggelapkan pajak di New York senilai lebih dari AS \$1 miliar atas penjualan sekitar A \$13,2 miliar
3	Adelphia Communication	Penipuan sekuritas	Adanya transaksi "aneh" yang menguntungkan keluarga Rigas, pendiri Adelphia antara lain pembelian lapangan golf di Pennsylvania dan pinjaman di luar neraca sebesar AS \$ 4,6 miliar bagi keluarga tersebut.
4	Global Crossing	Insider trading, penipuan sekuritas	Dugaan adanya transaksi penukaran kapasitas jaringan serat optic perusahaan yang menunggangi pendapatan perusahaan secara menyesatkan. Penukaran serupa juga diperkirakan dilakukan Qwest Communication dan pemain di

No	Nama Perusahaan	Tuduhan	Isu Kunci
			<i>industry energy</i> seperti Dynegey. Penyelidikan juga dilakukan SEC terhadap penjualan yang melibatkan orang dalam terhadap saham <i>Global Crossing</i> senilai AS \$1,3 miliar oleh para eksekutif perusahaan, terutama Chairman Gary Winnick.
5	Xerox Corporation	Manipulasi pembukuan	Dugaan adanya manipulasi pembukuan atas pendapatan perusahaan sebesar AS \$6 miliar. Jumlah tersebut tidak sama dengan taksiran <i>Securities and Exchange Commission (SEC)</i> seperti yang terbaca dalam <i>settlement</i> dengan perusahaan itu pada bulan April. Saat itu nilainya dari tahun 1997 sampai tahun 2000 menurut pengawas pasar modal diperkirakan sebesar AS \$3 miliar.
6	World Com	Manipulasi pembukuan	Dugaan adanya manipulasi pembukuan senilai AS \$4 juta pada sisi pengeluaran. Skandal <i>World Com</i> ini juga diduga melibatkan Arthur Andersen
7	Walt Disney Company	Manipulasi pembukuan	Manipulasi data keuangan untuk dua tahun fiskal. Menurut Disney, pendapatannya pada tahun 2001 adalah AS \$613 juta atau 29 sen perlembar saham. Sebelumnya dilaporkan nilainya AS \$358 juta atau 17 sen perlembar saham
8	ImClone System Inc.	Insider trading	Dugaan adanya pelatihan yang melibatkan mantan CEO ImClone

No	Nama Perusahaan	Tuduhan	Isu Kunci
			System, Samuel D. Waskal dan Martha Stewart, salah seorang anggota dewan direksi <i>New York Stock Exchange</i> (NYSE).

Sumber : Yulius Jogi Christiawan (2002:83) dan Agoes (2005:34) dalam Gunarianto (2010:5)

Sifat usaha industri perbankan berbeda dengan sifat usaha perusahaan sebagaimana diasumsikan teori keagenan pada umumnya karena jumlah pihak yang berkepentingan terhadap bank lebih banyak dari sektor usaha lain. Bank Indonesia sebagai regulator berusaha menciptakan disiplin pasar dan meminimalkan tindak penyimpangan moral (*moral hazard*) pengelola bank dapat menimbulkan risiko tinggi bagi para pemilik dana. Bank Indonesia menekankan perlunya *Good Corporate Governance* melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut dijelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (independensi), dan *fairness* (kewajaran).

Pasal 5 PBI Nomor 8/4/PBI/2006 menjelaskan Komisaris Independen, (1) Dewan Komisaris terdiri atas Dewan Komisaris dan Komisaris Independen, (2) Paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah Komisaris Independen. Pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang : (a) Komite Audit, (b) Komite Pemantau Risiko, (c) Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dengan dapat terukurnya variabel *Corporate Governance* secara empirik di industri perbankan yang dikaitkan dengan manajemen laba atau *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan, banyak peneliti yang berhasil mengungkapkan hubungan *Corporate Governance* dengan manajemen laba, dan *Corporate Governance* dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan.

FASB menetapkan salah satu tujuan pelaporan keuangan yakni memberikan informasi tentang kinerja keuangan manajemen (*enterprise's financial performance*) selama satu periode. Tujuan diatas mensyaratkan bahwa laba periode (*earnings*) dimaknai sebagai informasi tentang kinerja masa lalu yang meliputi daya melaba (*earning power*), akuntabilitas, dan efisiensi. Daya melaba dan efisiensi merupakan konsep yang saling berkaitan. Kinerja perusahaan merupakan manifestasi dari kinerja manajemen sehingga laba dapat pula diinterpretasi sebagai pengukur keefektifan dan keefisienan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Suwardjono, 2005:458).

SAK (2015:1.17) menjelaskan karena dampak dari berbagai kegiatan, transaksi dan peristiwa lain entitas berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk dapat diprediksi, maka pengungkapan unsur-unsur kinerja keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai dan dalam membuat proyeksi kinerja keuangan masa depan.

Nasution dan Setiawan (2007) yang meneliti atas 20 Bank Umum untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* terhadap manajemen laba yang diukur dengan komposisi dewan komisaris,

ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia periode 2000-2004. Hasil uji empirik menyatakan secara individual komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan, Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan, dan keberadaan komite audit dalam perusahaan perbankan mampu mengurangi manajemen laba.

Penelitian Eka Sefiana (2009) yang meneliti 27 perusahaan perbankan untuk menguji pengaruh penerapan *Corporate Governance* terhadap manajemen laba yang diukur dengan Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit terhadap tindakan manajemen laba dengan menggunakan *discretionary accruals model Jones*. Sampel dalam penelitian adalah perusahaan perbankan yang telah *go public* di BEI pada tahun 2007-2008.

Hasil uji empiris dalam penelitian tersebut menunjukkan, pertama Proporsi Komisaris Independen pada perusahaan sampel tidak berpengaruh untuk mengurangi manajemen laba. Kedua, Ukuran Dewan Komisaris pada perusahaan sampel tidak berpengaruh untuk mengurangi manajemen laba, Ketiga, Keberadaan Komite Audit pada perusahaan sampel tidak berpengaruh untuk mengurangi manajemen laba.

Penelitian Sam'ani (2008) mengenai Pengaruh *Corporate Governance* dan *leverage* terhadap Kinerja Keuangan perbankan menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja, aktifitas dewan komisaris mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja, Ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja, Komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja, Ukuran komite audit mempunyai

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja, dan *leverage* mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja.

Dengan perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* di BEI tahun 2005-2009). Dalam konsep *Good Corporate Governance* sektor perbankan mengacu pada PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yaitu: Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit. Penelitian ini untuk menguji variabel *Good Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* di BEI tahun 2005-2009.

Secara umum Perkembangan Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009 yang meliputi : *Net Interest Margin, Loan to Deposit Ratio, Return on Assets, Return on Equity*, Beban Operasional dan Pendapatan Operasional tampak pada tabel 1.2 berikut:

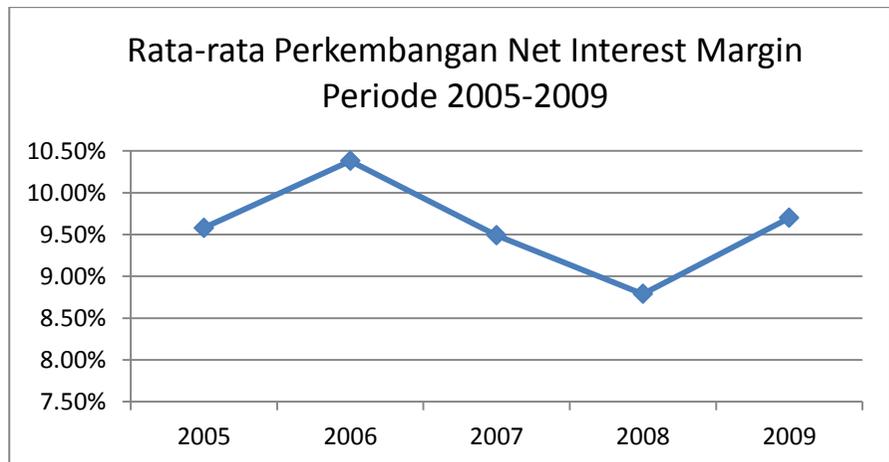
Tabel 1.2 Rata-Rata Perkembangan Kinerja Keuangan

Bank Umum Swasta Nasional Sampel Penelitian 2005-2009

NO	KETERANGAN	2005	2006	2007	2008	2009
1	NIM	9.58%	10.38%	9.49%	8.79%	9.70%
2	LDR	63.26%	63.51%	68.61%	74.84%	72.12%
3	ROA	2.54%	2.30%	2.37%	2.08%	2.12%
4	ROE	17.89%	15.19%	16.06%	14.95%	14.12%
5	BOPO	49.43%	54.09%	46.99%	46.58%	45.62%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio pendapatan bunga bersih terhadap jumlah kredit yang diberikan (*Outstanding Credit*). NIM suatu bank menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit. Untuk mendapatkan perolehan NIM yang meningkat perlu menekan biaya dana yang dikeluarkan oleh bank.



Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian

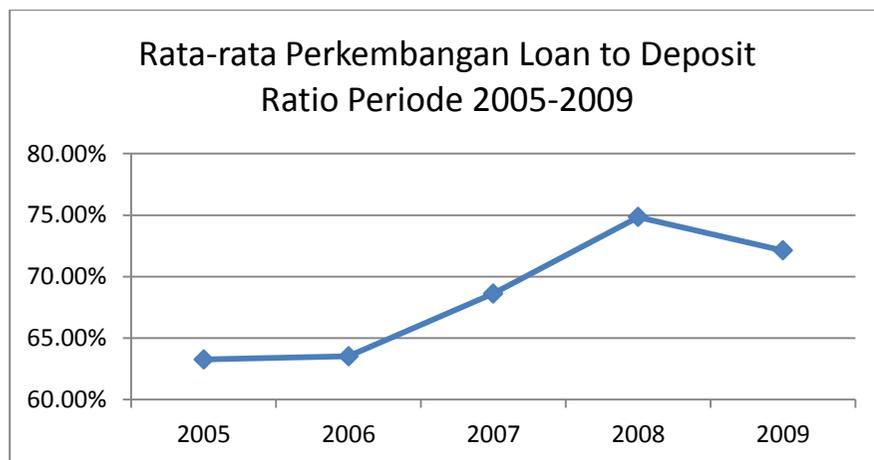
Gambar 1.1 Rata-Rata NIM Bank Umum Swasta Nasional Periode 2005 – 2009

Pada Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa rata-rata NIM pada tahun 2006 merupakan puncak perolehan yakni sebesar 10,38%. Kemudian perolehan NIM mengalami penurunan sampai pada tahun 2008 posisi NIM 8,79%, merupakan posisi terkecil..

Loan Deposit to Ratio (LDR) menurut Taswan (2003:344) merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan dengan Dana Pihak Ketiga. Dana pihak ketiga meliputi : Giro (*demand deposit*), Deposito (*time deposit*), Tabungan (*saving deposit*) tidak

termasuk giro dan deposito antar bank. Sedangkan perkembangan yang terkait dengan seberapa besar Bank Umum Swasta Nasional *Go public* menyalurkan dana yang diperoleh dari Dana Pihak Ketiga mengalami fluktuasi.

Perkembangan *Loan to Deposit Ratio* Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009 dapat dilihat dalam Gambar 1.2 berikut ini.



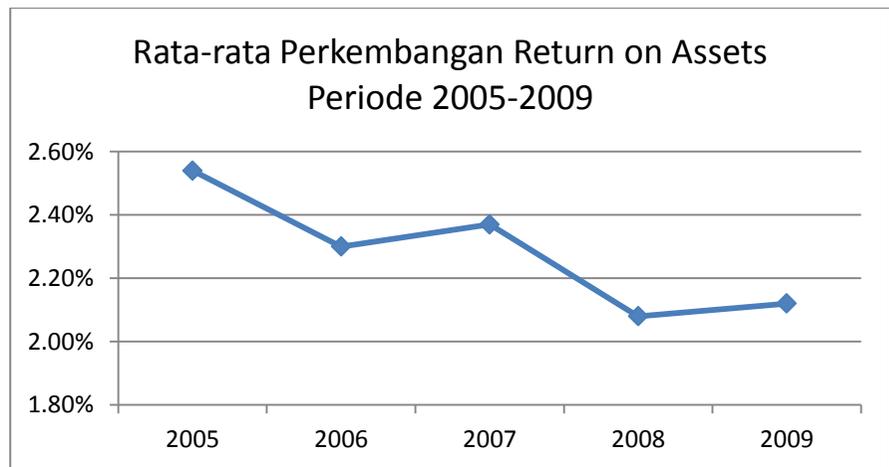
Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian

Gambar 1.2 Rata-Rata Perkembangan LDR Bank Umum Swasta Nasional Periode 2005-2009

Pada gambar 1.2 ternyata perkembangan penyaluran pinjaman yang diberikan atau *Loan to Deposit Ratio* kepada debitor oleh Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* dalam kurun waktu 2005-2009 mengalami kenaikan yang berfluktuasi. Angka LDR tertinggi tercapai pada tahun 2008 yakni sebesar 74,84%, sedangkan angka LDR terendah terjadi pada tahun 2005 dengan angka tercatat sebesar 63,26%. LDR merupakan kemampuan bank untuk

menyalurkan pinjaman kepada debitor atas Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperolehnya dengan harapan mendapatkan pengembalian pokok maupun bunga dari debitor tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Perkembangan perolehan *Return on Assets* Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2009 dapat dilihat dalam gambar 1.3 berikut ini.



Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian

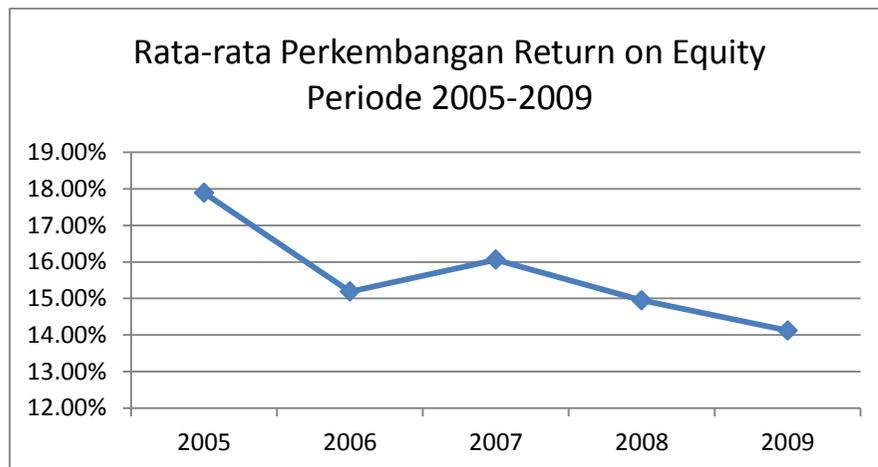
Gambar 1.3. Perkembangan Rata-Rata ROA Bank Umum Swasta Nasional Periode 2005 - 2009

Pada Gambar 1.3 ternyata efektifitas mendayagunakan aset oleh manajemen bank umum swasta nasional *Go Public* berfluktuasi setiap periodenya dan selalu mengalami penurunan yang memprihatinkan. Angka *Return on Assets* (ROA) selama kurun waktu tahun 2005-2009 tercatat tertinggi pada tahun 2005 yakni sebesar 2,54%. Kemudian turun setiap tahunnya hingga pada akhir

tahun 2009 mencapai angka 2,12%. Posisi ROA tercatat paling rendah terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 2,08%.

Return on Assets merupakan prestasi kinerja bank memperoleh pendapatan atas kemampuannya untuk mendayagunakan aset yang dimilikinya. Kemampuan memutar aset ini tergantung pada *bussines plan* perusahaan yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Di bagian lain perkembangan perolehan *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2009 dapat dilihat dalam gambar 1.4 berikut ini.



Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian

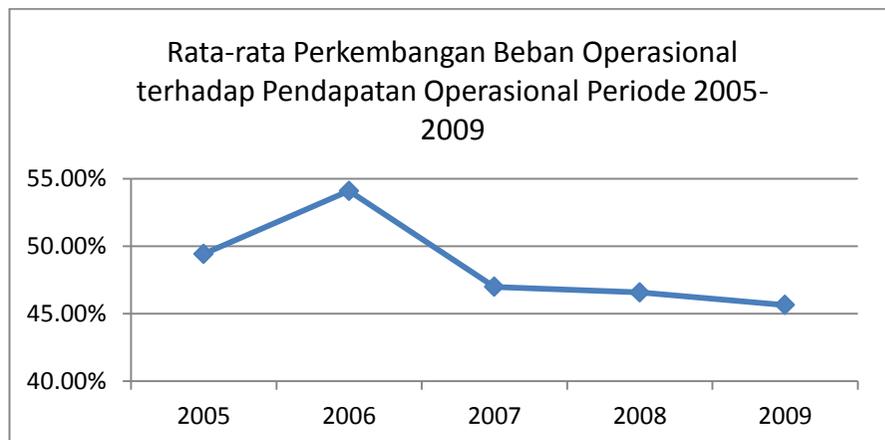
Gambar 1.4 Perkembangan Rata-Rata ROE Bank Umum Swasta Nasional Periode 2005 - 2009

Pada gambar 1.4 ternyata efektifitas mendayagunakan ekuitas yang dimiliki manajemen bank umum swasta nasional *Go Public* berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2005-2009. Angka

Return on Equity (ROE) tertinggi tercatat pada tahun 2005 yakni sebesar 17,89% kemudian turun setiap tahunnya hingga pada akhir tahun 2009 menjadi 14,12%. Posisi ROE tercatat paling rendah terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 14,12%

Return on Equity merupakan prestasi kinerja bank memperoleh pendapatan atas kemampuannya untuk mendayagunakan ekuitas yang dimilikinya. Kemampuan memutar ekuitas ini tergantung pada *business plan* perusahaan yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Perkembangan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2009 dapat dilihat dalam gambar 1.5 berikut ini.



Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian

Gambar 1.5. Perkembangan Rata-Rata BOPO Bank Umum Swasta Nasional Periode 2005 - 2009

Pada gambar 1.5 ternyata rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional yang dimiliki manajemen bank umum swasta nasional berfluktuasi selama kurun waktu tahun 2005-2009. Angka BOPO tertinggi tercatat pada tahun 2006 yakni sebesar 54,09% kemudian turun setiap tahunnya hingga pada akhir tahun 2009 menjadi 45,65%, dan posisi BOPO tercatat paling rendah terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 45,65%

Dengan memahami perkembangan kinerja keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* di BEI tahun 2005-2009, maka penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel, objek, periode dan alat analisis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengaitkan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian di sektor manufaktur yang pernah dilakukan antara lain oleh Gideon Sb Boediono (2005) dengan variabel-variabel: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris. Ujiantho dan Pramuka (2007) dengan variabel-variabel: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris.
2. Penelitian disektor perbankan yang pernah dilakukan antara lain oleh Sam'ani (2008) dengan variabel-variabel :Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit dan *Leverage*. Penelitian Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007) dengan variabel-variabel: Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Keberadaan Komite Audit.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dengan uraian pada latar belakang tersebut diatas tersirat adanya permasalahan yang perlu untuk dikaji lebih lanjut tentang *Good Corporate Governance* yang dikaitkan dengan Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009. Beberapa perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Sejahteranya *Good Corporate Governance* dalam hal ini Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, dalam rangka penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum ?
- b. Sejahteranya penerapan *Good Corporate Governance* dalam hal ini Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit dijalankan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu meminimalisir praktik Manajemen Laba ?
- c. Sejahteranya penerapan *Good Corporate Governance* dalam hal ini Komisaris Independen, Komite Audit dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai Kinerja keuangan?
- d. Seberapa besar manajemen laba mempengaruhi kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, dapatlah dikemukakan beberapa tujuan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian yang akan dikemukakan ini terkait dengan *fit model* yang dianalisis melalui Aplikasi *Structural Equation Modelling* (SEM)

dengan program *Analysis of Moment Structure* (AMOS) sebagai berikut :

- a. Untuk menemukan bukti empiris hubungan antar variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit pada Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* dalam upaya pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum ?
- b. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* dalam hal ini Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba
- c. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* dalam hal ini Komisaris Independen, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan
- d. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh praktik Manajemen Laba terhadap kinerja keuangan Bank Umum Swasta Nasional *go public*

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini, antara lain meliputi :

- a. Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengembangan *Agency Theory*, *Good Corporate Governance*, *Earning Management*, khususnya pengetahuan Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

- b. Hasil temuan ini dapat dipergunakan bagi pengelola bank untuk referensi pelaksanaan konsep *Good Corporate Governance* agar ke depan industri perbankan semakin menjadi lebih baik.
- c. Bagi Bank Indonesia, bukti empiris ini dapat dipergunakan sebagai referensi pengembangan penerapan *Good Corporate Governance*, dan fungsi pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai *regulator* dapat memberikan standar pelaksanaan *Good Corporate Governance* agar praktik manajemen laba tidak semata untuk kepentingan manajemen semata, tetapi lebih prospek jauh kedepan untuk perbaikan industri perbankan secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan telah berkembang dengan dua basis yakni *positivist* dan *principal-agent*. Seperti yang dikemukakan Eisenhardt (1989) mengenai perkembangan teori agensi yang dikutip dari Jensen (1983) :

“From its roots in information economics, agency theory has developed along two lines : positivist and principal-agent (Jensen,1983). The two streams share a common unit of analysis : the contract between the principal and the agent”.

Peneliti positivis teori agensi telah terfokus pada identifikasi situasi di mana *principal* dan agen cenderung memiliki tujuan yang saling bertentangan dan kemudian menggambarkan mekanisme pengelolaan yang membatasi pelayanan perilaku diri sendiri agen. Peneliti *principal-agent* memperhatikan dengan teori umum dari hubungan atasan-agen, sebuah teori yang dapat diterapkan untuk majikan-karyawan, pengacara-klien, pemasok-pembeli, dan hubungan keagenan yang lain.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Sedangkan *positif accounting theory* (Watts dan Zimmerman,1990) secara *implisit* mengakui tiga bentuk hubungan keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen (*bonus plan*

hypothesis), kreditur dengan manajemen (*debt/equity hypothesis*), dan pemerintah dengan manajemen (*political cost hypothesis*).

Dalam hubungan kepentingan antara investor dan manajemen dalam pengelolaan bisnis seringkali terjadi suatu hubungan yang bersifat *agency relationship* (hubungan keagenan). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan :

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih orang yang disebut prinsipal melibatkan orang lain atau agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dengan pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Namun demikian seringkali hubungan keagenan ini menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu timbulnya *agency cost* (biaya keagenan).

Ini juga mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen bertindak rasional dan bahwa mereka akan menggunakan proses kontrak untuk memaksimalkan kekayaan mereka. Ini berarti bahwa karena agen mencari motif maka mereka cenderung untuk mengambil kesempatan untuk bertindak melawan kepentingan pemilik perusahaan, misalnya dengan mengambil bagian dalam tingginya tingkat konsumsi penghasilan tambahan.

Adams (1994) mengemukakan teori agensi yang dikaitkan dengan informasi keuangan dalam perusahaan sebagai berikut :

“Agency theory is part of the positivist group of theories which derives from the financial economics literature. It postulates that

the firm consists of a nexus of contracts between the owners of economic resources (the principals) and managers (the agents) who are charged with using and controlling those resources. Furthermore, agency theory is based on the premiss that agents have more information than principals and that this information asymmetry adversely affects the principals' ability to monitor effectively whether their interests are being properly served by agents. It also assumes that principals and agents act rationally and that they will use the contracting process to maximize their wealth".

Agensi teori adalah bagian dari kelompok positivis teori yang berasal dari literatur ekonomi keuangan. Hal ini mendalilkan bahwa perusahaan terdiri dari perhubungan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomi (para pelaku) dan manajer (agen) yang dibebankan dengan menggunakan dan mengendalikan sumber daya tersebut. Selanjutnya, teori keagenan didasarkan pada dasar pikiran bahwa agen memiliki informasi lebihdari prinsipal dan bahwa ini merupakan asimetri informasi negatif yang mempengaruhi kemampuan para pelaku untuk memantau secara efektif apakah kepentingan mereka dengan benar dilayani oleh agen.

Tipe lain dari masalah keagenan yang timbul menurut Adam (1994) adalah *adverse selection*. Hal ini terjadi ketika prinsipal/pemilik tidak memiliki akses ke semua informasi yang tersedia pada saat keputusan dibuat oleh manajer dan dengan demikian tidak dapat menentukan apakah manajer melakukan tindakan demi kepentingan terbaik perusahaan.

Memang terdapat dua kepentingan yang saling bertolak satu dengan yang lain didalam perusahaan, dan masing-masing pihak berusaha untuk memenuhi atau dapat juga mempertahankan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Karena itu timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi ini. Sebagai

agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk memaksimalkan perolehan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan diperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam hal pengelolaan manajemen perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik atau pemegang saham. Ada tanggung jawab manajemen untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Suwardjono (2005:101) mengutip pelaporan keuangan dari *Financial Accounting Standar Board* sebagai berikut :

“Financial reporting includes not only financial statement but also other means of communication information that relates to, directly and indirectly to information provided by the accounting system-that is, information about an enter prise’s resources, obligations, earning etc. Pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui pernyataan keuangan.

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai *information asymmetry* (asimetri informasi). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan *earnings management* (manajemen laba) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

“The agency problem in an essential element of the so-called contractual view of the firm, developed by Coase (1937), Jensen and Meckling (1976), and Fama and Jensen (1938). The essence of

the agency problem is the separation of management and finance, or of ownership and control. An entrepreneur, or a manager, raises fund from investors either to put them to productive use or to cash out his holdings in the firm. The financiers need the manager's specialized human capital to generate returns on their fund. The manager needs the financiers' funds, since he either does not have enough capital of his own to invest or else wants to cash out his holdings".

Dalam masalah agensi sebuah elemen penting disebut pandangan kontrak atas perusahaan, dikembangkan oleh Coase (1937), Jensen dan Meckling (1976), dan Fama dan Jensen (1982). Inti dari *agency problem* adalah pemisahan manajemen dan keuangan, atau kepemilikan dan kontrol. Seorang pengusaha, atau manajer, meningkatkan dana dari investor baik dengan menemukannya secara produktif atau untuk pengeluaran kas dalam perusahaan. Para pemodal membutuhkan manajer yang khusus untuk menghasilkan pengembalian dana para investor.

Jensen dan Meckling (1976) yang mengutip dari Berle dan Means (1932) mengemukakan bahwa literatur perbankan telah menekankan dua jenis masalah keagenan. Pertama, pemegang saham perseroan terbatas memberikan insentif untuk mengambil alih kekayaan dari pemegang obligasi dengan meningkatkan risiko. Karena pemegang obligasi keuangan perisai keselamatan (terutama deposito) bersih dari konsekuensi risiko, bank mengambil insentif mereka untuk memantau dan membatasi pengambilan risiko tersebut sangat terbatas. Tidak adanya pemantauan tersebut dikenal sebagai *moral hazard* atau masalah moral hazard yang terkait dengan asuransi simpanan dalam literatur perbankan. Kedua, tidak ada pemantauan yang tepat dan disiplin oleh pemegang saham, manajer dapat mencapai tujuan mereka sendiri dengan mengorbankan para pemegang saham.

Perbankan adalah suatu industri yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya sehingga teori keagenan pada perusahaan perbankan mempunyai karakteristik sendiri. Perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Karena fungsinya tersebut maka risiko yang harus dihadapi bank sangat besar, ketidakmampuan untuk menjaga image (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank.

Dengan adanya regulasi di dalam perbankan mengakibatkan hubungan keagenan industri ini berbeda dengan hubungan keagenan dalam perusahaan yang tidak teregulasi. Dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia sehingga mengakibatkan masalah keagenan menjadi semakin kompleks. *Moral hazard* terhadap suatu regulasi yang muncul lebih menunjukkan lemahnya peraturan dibandingkan konflik antara manajer dan pemilik.

Dengan deregulasi justru akan semakin memperbesar *moral hazard* karena di satu sisi memberikan kebebasan bank untuk mengambil risiko bisnis yang lebih besar dan di pihak lain, *regulator* menanggung sebagian risiko ini dari komitmen yang tidak dapat dipenuhi oleh bank karena regulator merupakan lembaga pemberi dana terakhir.

Hasil penyelidikan para regulator pemerintah dan analisis kalangan cendekiawan manajemen menyimpulkan bahwa penyebab utama tumbangannya perusahaan-perusahaan besar itu adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate*

Governance disamping juga karena semakin terpisahnya hubungan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan yang terutama terjadi di negara-negara maju (Masyhud Ali, 2006).

2.2 Good Corporate Governance

Konsep *good corporate* berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia (Sulistyanto, 2008). Masyhud Ali (2006) mengemukakan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang dipergunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* juga mengandung pengertian mengenai peraturan atas pembagian tugas dan tanggung jawab diantara para pihak atau para *key players* yang berpartisipasi dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam perusahaan.

Organization for Economic Cooperation and Development (2004) dan *Forum for Corporate Governance* (2001) dalam Boediono (2005) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Good Corporate Governance mengarah pada sistem, seperti yang dikemukakan Sulistyanto (2008:134), Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sejalan dengan

pernyataan *Asian Development Bank* (ADB) yang menyatakan, bahwa:

The issue of corporate governance arises because of the separation of ownership from control in modern corporations. When salaried managers run companies on behalf of dispersed shareholders, they may not act in shareholders and managers, but also between controlling and minority shareholders, between shareholders and creditors and between controlling shareholders and other stakeholders; including suppliers and workers. A sound corporate governance system should provide effective protection for shareholders and creditors such that they are not denied the return on their investment.

Lebih jauh Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan bahwa *Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai "*agents*" bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Sulistyanto (2008:138) ada harapan yang ingin diraih dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, yaitu kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab.

a. Keadilan

Keadilan merupakan perlindungan terhadap hak seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas (*minority shareholder*), untuk memperoleh informasi secara tepat waktu dan teratur, memberikan suara dalam rapat pemegang saham, memilih direksi dan komisaris, dan pembagian laba perusahaan.

b. Transparansi

Transparansi merupakan pengungkapan (*disclosure*) setiap kebijakan atau aturan yang (akan) diterapkan perusahaan,

sebab kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara adil, akurat, dan tepat waktu

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas didasarkan pada sistem internal *checks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris manajer, dan auditor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan dituntut untuk menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat
- b. Perusahaan harus mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris
- c. Perusahaan harus mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Auditor Internal sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practices*
- d. Perusahaan harus menggunakan jasa auditor eksternal yang profesional

d. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lain yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan :

- a. Suatu struktur yang mengatur polahubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para stakeholder lainnya.
- b. Suatu sistem *Check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan
- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam lingkup pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya Bapepam mendorong perusahaan publik untuk memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip : *transparency*, dengan cara meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang *Performance* perusahaan secara tepat waktu, baik yang berupa informasi keuangan maupun bukan keuangan. *Fairness*, dengan cara memaksimalkan perlindungan hak dan perlakuan adil kepada seluruh shareholders tanpa kecuali.

Responsibility, dengan cara mendorong optimalisasi peran stakeholders dalam rangka mendukung program-program perusahaan. *Accountability*, dengan cara mendorong optimalisasi peran dewan direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

Agar semua prinsip-prinsip yang tercakup dalam *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Sulistyanto (2008:141) mengemukakan bahwa untuk membangun sistem pengawasan dan

pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan, yaitu Komite Audit (*audit committee*) dan Komisaris Independen (*board of director*).

Bagi bank, menurut Masyhud Ali (2006:334) *corporate governance* sekaligus memfasilitasi terbentuknya struktur yang membantu bank dalam berbagai bentuk peranan manajemen. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 6 Bank Indonesia mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Cornett (2009:4) Bank menggunakan mekanisme tatakelola ditentukan oleh manfaat relatif dan biaya dari masing-masing ketika mereka menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham mereka. Jadi, ada kemungkinan bahwa mekanisme tatakelola yang tidak independen, namun dipilih untuk memaksimalkan *performance*.

Masyhud Ali (2006:334) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi atau *board of executive directors*, *stakeholders*, dan pemegang saham suatu perusahaan. Bagi bank, *corporate governance* sekaligus juga memfasilitasi terbentuknya struktur yang membantu bank dalam berbagai bentuk peranan manajemen, yang meliputi:

- a. Perumusan dan penetapan visi dan misi serta tujuan (*objectives*) yang ingin dicapai manajemen bank
- b. Pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasional bank sehari-hari,
- c. Mempertimbangkan dan mengupayakan terpenuhinya kepentingan para *stakeholders* bank

- d. Memastikan bahwa bank senantiasa melakukan kegiatan operasionalnya dengan cara pengelolaan yang sehat dan aman
- e. Melakukan upaya demi terpenuhinya hukum dan regulasi yang relevan dengan kegiatan operasional bank
- f. Berupaya melindungi kepentingan khususnya para deposan dan para pemilik sumber pendanaan bagi bank pada umumnya

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris. Pasal 108 (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 116 Dewan Komisaris wajib: a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran

komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris dalam pengertian bahwa Dewan Komisaris harus memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi.

Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Secara umum Dewan Komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan.

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang menurut Undang-Undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan, melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris memiliki peran yang penting dalam *Good Corporate Governance*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum diuraikan dalam pasal 4 bahwa (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. (3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Komisaris Independen

Dalam upaya mengelola perusahaan dengan mengikuti aturan umum *Good Corporate Governance*, peran Komisaris Independen, sangat diperlukan. Komisaris Independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, disklosure, kemandirian, akuntabilitas dan praktik keadilan menurut ketentuan yang berlaku.

Sulistiyanto (2006:145) menguraikan ada beberapa misi yang diemban Komisaris Independen untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih dan bertanggung jawab. Pertama, mendorong terciptanya iklim yang objektif dan keadilan untuk semua kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial. Kedua, mendorong diterapkannya prinsip dan praktik *good corporate governance* di Indonesia. Ketiga, bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum diuraikan dalam pasal 5 bahwa (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Klein (2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa *board of director* dari pihak independen dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Hal ini juga dinyatakan oleh Cornett *et al.* (2008) dimana kinerja operasi dan *stock return* bertambah baik dengan semakin meningkatnya komisaris independen (Murhadi, 2009)

Komite Audit

Agar semua prinsip-prinsip yang tercakup dalam *good corporate governance* dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Sulistyanto (2008:141) untuk membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan yaitu komite audit (*audit committee*) dan komisaris independen (*board of director*). Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas

laporan keuangan dan peningkatan efektifitas internal dan eksternal audit.

Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari: (a). seorang Komisaris Independen; (b). seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan (c). seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit, menurut Sulistyanto (2008:141) melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektifitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai. Beberapa aspek penting pengawasan yang harus dilakukan komite audit untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. (a) Penyusunan Laporan Keuangan, (b) Manajemen Risiko dan Pengendalian, (c) *Corporate governance*

Komite Audit Independen meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat

mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Komite audit berfungsi sebagai jembatan jaringan komunikasi antara auditor internal dan eksternal dan dewan direksi, dan kegiatan mereka memperhitungkan review auditor dinominasikan, keseluruhan ruang lingkup audit, hasil audit, kontrol keuangan internal dan informasi keuangan untuk publikasi

2.3 Manajemen Laba

Secara umum beberapa definisi manajemen laba berbeda-beda satu dengan yang lainnya, Sulistyanto (2008:48) mengutip definisi manajemen laba yang diciptakan oleh Davidson, Stickney, dan Weil (1987), Shipper (1989), *National Association of Fraud Examiners* (1993), Fisher dan Rosenzweig (1995), Lewitt (1998), serta Healy dan Wahlen(1999) sebagai berikut :

Davidson, Stickney, dan Weil:

“Earning management is the process of taking deliberate steps within the constraints of generally accepted accounting principles to bring about desired level of reported earning.” (Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan)

Schipper

“Earning management is a purposes intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain (as opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process).” (Manajemen laba adalah campur

tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi)

National Association of Certified Fraud Examiners

"Earning anagement is the interntional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or ater his or judgement or decision." (Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua inforasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya).

Fisher dan Rosenzweig

"Earning management is a actions of a manager which serve to increase (decrease) current reported earning of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in long term economic profitability of the unit." (Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang).

Lewitt

"Earning management is flexibility in accounting allows it to keep pace with business innovations. Abuses such as earnings occur when people exploit this pliancy. Trickery is employed to obscure actual financial volatily. This in turn, make the true consequences of management decisions." (Manajemen laba adalah

fleksibilitas akuntansi untuk menyetarakan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer).

Healy dan Wahlen

“Earnings management occurs when managers uses judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying conomics performance of the company or to influence contactual outcomes that depend on the reported accounting numbers” (Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu).

Dedhy Sulistiawan (2011:40) mengutip rangkuman Manajemen Laba dari Scott (1977), bahwa pola umum yang banyak dilakukan dalam praktik manajemen laba yaitu *taking a bath, income minimization, income maximization, dan income smothing*. Sedangkan teknik legal yang biasanya dijumpai dalam praktik manajemen laba dapat dikelompokkan kedalam lima teknik, yaitu: mengubah metode akuntansi, membuat estimasi akuntansi, mengubah periode pengakuan pendapatan dan biaya, mereklasifikasi akun *current dan non current*, serta mereklasifikasi akrual diskresioner (*accrual discretionary*) dan akrual non deskresioner (*accrual non discretionary*) (Wolk, Dodd,dan Tearney).

Gumanti (2000) mengutip Magnan dan Cormier (1997) menyatakan bahwa ada tiga sasaran yang dapat dicapai oleh

manajer sehubungan dengan praktek manajemen laba. Ketiga sasaran tersebut adalah minimisasi biaya politis (*political cost minimization*), maksimisasi kesejahteraan manajer (*manager wealth maximization*), dan minimisasi biaya financial (*minimization of financing costs*).

KR Subramanyam, dan John J wild (2010:333) Bentuk manajemen laba pada kenyataannya sangat beragam, beberapa bentuk manajemen laba yang harus diwaspadai: Perubahan metode atau asumsi akuntansi, menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa, *big baths*, penurunan nilai, dan menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban.

2.4 Kinerja Keuangan

Performance atau kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan tertentu.

Informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja ada dua yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Adapun informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah informasi keuangan (*financial information*), yaitu informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan seperti laba sebelum pajak, tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya. Sedangkan non keuangan adalah informasi yang disajikan tidak dalam satuan uang atau rupiah (*non financial information*).

Sehubungan dengan kinerja keuangan perusahaan, Sodik (2009:29) mengutip pengertian kinerja perusahaan dari Helfert sebagai berikut :

“Kinerja perusahaan adalah hasil dari semua keputusan manajemen yang dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu mengaitkannya dengan kinerja keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan-keputusan itu. Analisis kinerja keuangan ini didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan, seperti tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim digunakan”.

Menurut Sucipto (2003:2) kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja dan waktu serta penghargaan baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

Kinerja perusahaan merupakan manifestasi dari kinerja manajemen sehingga laba dapat pula diinterpretasi sebagai pengukur keefektifan dan keefisienan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Suwardjono, 2005:458).

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Gideon Sb Boediono (2005) mengkaitkan *Good Corporate Governance* dengan variabel Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris pengaruhnya terhadap Manajemen Laba serta

Kualitas Laba. Penelitian Godeon memusatkan pada populasi industri manufaktur tahun 1996-2002.

Ujiantho dan Pramuka (2007) meneliti *Good Corporate Governance* dengan variabel Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris pengaruhnya terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Penelitian Ujiantho memusatkan pada populasi industri manufaktur tahun 2002-2004.

Penelitian disektor perbankan yang mengkaitkan *Good Corporate Governance* dilakukan oleh Sam'ani (2008) dengan variabel *Good Corporate Governance* dan *Leverage* dengan Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2004-2007. Penelitian lain yang dilakukan oleh Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007) menggunakan populasi perbankan dengan sampel tahun 2000-2004.

Cornett et. al (2009) meneliti *Corporate governance and earnings management at large U.S. bank holding companies*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memainkan setidaknya beberapa peran dalam laba dan manajemen laba di bank-bank besar Amerika Serikat. Peneliti menemukan bahwa kinerja, manajemen laba, dan mekanisme tata kelola menentukan faktor endogen.

Nesrine Klai and Abdel Wahed Omri (2011) meneliti *Corporate Governance and Financial Reporting Quality : the Case of Tuninan Firms* yang terdaftar di SE periode 1997-2007. Hasil menunjukkan bahwa Tunisia perusahaan dicirikan oleh kurangnya independensi dewan dan tingginya tingkat kepemilikan konsentrasi. Mekanisme tata kelola yang diwakili terutama oleh kekuatan asing, keluarga, blockholders, para investor institusional dan Negara. Ini mekanisme kontrol mempengaruhi pelaporan keuangan kualitas perusahaan Tunisia.

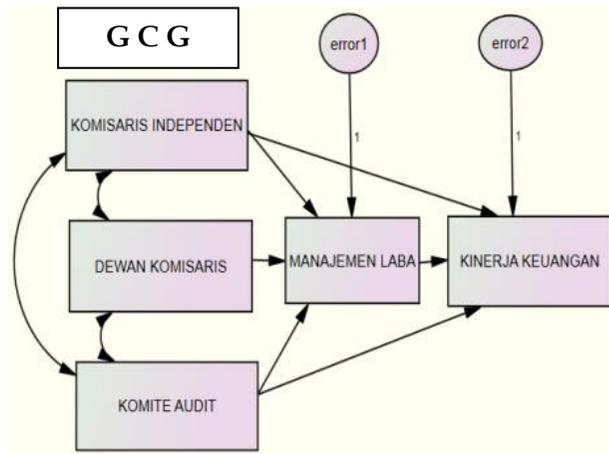
2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka Pemikiran

Dengan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu tentang *Good Corporate Governance* maka penelitian ini meneliti Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen laba dan Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* periode 2005-2009, dengan menggunakan model penelitian sebagai berikut :

1. Model hubungan antara Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit sebagai proksi dari *Good Corporate Governance*
2. Model pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit sebagai proksi *Good Corporate Governance* terhadap praktik Manajemen Laba
3. Model pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit sebagai proksi *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan
4. Model pengaruh praktik Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan

Dengan menggunakan Aplikasi *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan program *Analysis of Moment Structure* (AMOS) versi 18 direkomendasikan suatu model penelitian yang telah memenuhi *Fit Model*. Dengan demikian maka model tersebut menjadi acuan sebagai kerangka pemikiran penelitian dengan *fit model* hasil AMOS. Struktur Model Hubungan Antar Variabel Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit) terhadap Manajemen Laba dan pada Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional 2005-2009, seperti gambar 2.1 berikut ini.



Sumber : Hasil Analisis melalui Program AMOS

Gambar 2.1 Struktur Model Hubungan Antar Variabel

Hipotesis

Dalam penelitian ini ingin diketahui pengaruh variable *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit), terhadap Manajemen Laba dan pada Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009

Sesuai dengan tujuan penelitian dan kerangka pemikiran diatas maka diajukan beberapa dugaan jawaban sebagai hipotesis, yaitu hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan *Good Corporate Governance* dalam hal ini Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009.
2. Terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* dalam hal ini Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009.

3. Terdapat pengaruh *Good Corporat Governance* dalam hal ini Komisaris Independen, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* 2005-2009.
4. Terdapat pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan terhadap beberapa variabel penerapan *Good Corporate Governance* sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Khususnya ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 38 yakni : Dewan Komisaris, Komisaris independen, Komite Audit yang mempengaruhi Manajemen Laba, serta implikasinya pada Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009.

3.2 Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif* yang menurut Rianse (2009:26-27) penelitian *deskriptif* berusaha memberikan gambaran yang cermat dan lengkap tentang obyek yang diteliti. Penelitian *deskriptif* dapat menggunakan data kuantitatif yang dipakai menguji hipotesis-hipotesis. Jenis-jenis metode dalam penelitian deskriptif terdiri dari studi kasus, survey, penelitian pengembangan, dan penelitian berkelanjutan.

Penelitian *deskriptif* bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya, juga

memberikan gambaran situasi kejadian atau memberikan hubungan antara fenomena, pengujian hipotesis-hipotesis, membuat prediksi dan implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan (Nawawi, 2003; Sangarimbun dan Efendi, 1989) dalam Rianse (2009:185). Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *sampling purposive* artinya menurut Sugiyono (2008:85) teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Penelitian ini dirancang untuk menjelaskan pengaruh variabel *Good Corporate Governance* seperti Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba yang diukur dengan *Discretionary Accruals model Jones* dan pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan menggunakan *Cash Flow Return on Assets* (CFROA) atas Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2008:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sodik (2009:94) mengutip pengertian populasi dari MC Clave (1985) sebagai berikut: "*The population is a set of data that characterizes some phenomenon (in our situation, same business phenomenon). A sample is a subset of data selected from the population.*"

Populasi dalam penelitian ini merupakan industri perbankan Swasta Nasional yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009 dengan jumlah 30 Bank Swasta Nasional. Dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representatif* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dari 30 bank

sebagai populasinya maka jumlah bank yang dapat dijadikan sampel sesuai dengan kriteria ada 16 Bank Umum Swasta Nasional.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat dokumen data sekunder yang berupa *annual report* Bank Umum Swasta Nasional *go public* yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Dengan 16 entitas sampel selama 5 tahun maka diperoleh pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 80 pengamatan.

Beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih sampel yang *representatif* adalah sebagai berikut :

- a. Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2005-2009.
- b. Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan dan telah diaudit oleh KAP selama lima tahun berturut-turut dalam periode tahun 2005-2009
- c. Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dalam periode 2005-2009 tidak melakukan pergantian nama perusahaan dan yang harus menjalankan Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yakni: Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit tahun 2005-2009.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* yang diproksi oleh variabel independen : Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan

Komite Audit, pengaruhnya terhadap Manajemen Laba serta implikasinya pada Kinerja Keuangan. Sebagai objek penelitian difokuskan pada laporan keuangan bank umum swasta nasional *Go Public* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2005 hingga 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Pengambilan data sebagai sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, antara lain : emiten termasuk Bank Umum Swasta Nasional, emiten yang *Go Public* tahun 2005-2009, emiten menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP tahun 2005-2009. Menurut Daftar Emiten di Pasar Modal Indonesia periode 2005-2009 terdapat 31 Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* dan yang memenuhi kriteria untuk diobservasi hanya 16 emiten. Keseluruhan pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 pengamatan penelitian.

Daftar sampel penelitian pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dalam hal ini Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit tampak pada Tabel 3.1 tersebut di bawah ini :

Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian

NO	NAMA PERUSAHAAN	LISTING	KODE
1	PT Bank Pan Indonesia,Tbk	29 Desember 1982	PNBN
2	PT Bank Internasional Indonesia,Tbk	21 Nopember 1989	BNII
3	PT Bank CIMG Niaga,Tbk	29 Nopmber 1989	BNGA
4	PT Bank Danamon,Tbk	6 Desember 1989	BDMN
5	PT Bank Permata,Tbk	15 Januari 1990	BNLI
6	PT Bank Artha Graha Internasional,Tbk	23 Agustus 1990	INPC
7	PT Bank OCBC NISP,Tbk	20 Oktober 1994	NISP
8	PT Bank Mayapada,Tbk	29 Agustus 1997	MAYA
9	PT Bank Victoria International,Tbk	30 Juni 1999	BVIC

NO	NAMA PERUSAHAAN	LISTING	KODE
10	PT Bank Mega,Tbk	17 April 2000	MEGA
11	PT Bank Central Asia,Tbk	31 Mei 2000	BBCA
12	PT Bank Eksekutif Internasional,Tbk	13 Juli 2001	BEKS
13	PT Bank Nusantara Parahyangan,Tbk	10 Januari 2001	BBNP
14	PT Bank Swadesi,Tbk	1 Mei 2002	BSWD
15	PT Bank ICB Bumi Putra,Tbk	15 Juli 2002	BABP
16	PT Bank Kesawan,Tbk	21 Nopember 2002	BKSW

Sumber : ICMD 2005-2010

3.3 Operasional Variabel

Suatu penelitian diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan dan perlunya dipahami adanya unsur-unsur yang menjadi bagian mendasar dari suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Manajemen Laba yang digunakan untuk melakukan prediksi terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005 – 2009.

Beberapa definisi operasional yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam penelitian ini diukur dengan jumlah keanggotaannya yang ada dimana paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi (PBI No. 08/04/2006), Pasal 4 (1) Jumlah anggota dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Karena sesuai dengan fungsinya Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG, 2004). Dewan

komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris yang ada di bank umum tersebut

b. Komisaris Independen

Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator proporsi anggota Dewan Komisaris paling kurang 50% dari jumlah anggota komisaris adalah Komisari Independen (PBI Nomor : 8/4/PBI/2006), Pasal 5 (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Komisaris Independen, adalah Anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen (Panduan Bagi Komisaris dan Direksi)

c. Komite Audit

Komite Audit dalam penelitian ini diukur dengan kriteria PBI Nomor 8/4/PBI/2006 bahwa Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite Audit (pasal 38 PBI Nomor: 8/4/PBI/2006), pasal 38, ayat (4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit

Sulistyanto (2008:141) Komite audit bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai.

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Diharapkan Keberadaan Komite Audit dalam manajemen bank dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen untuk cenderung melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

d. Manajemen Laba

Sulistiyanto (2008:211) secara umum ada tiga pendekatan yang telah dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu model yang berbasis *aggregate accrual*, *specific accruals*, dan *distribution of earnings after management*. Model *aggregate accrual* yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba.

Eka Sefiana (2009) mengutip Dechow et al (1995) bahwa penggunaan *Discretionary accruals* sebagai proksi Manajemen Laba dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model* dengan rumusan sebagai berikut:

$$TA_{it} = Nit - CFO_{it}$$

Nilai Total Accrual (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut :

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Rev_{it}/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai *Non Discretionary Accruals* (NDA) dapat dihitung menggunakan rumus :

$$NDA_{it} = \beta_1(1/A_{it}) + \beta_2(\Delta Rev_{it}/A_{it-1} - \Delta Rect_{it}/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1})$$

Selanjutnya *Discretionary Accruals* (DA) dapat dihitung sebagai berikut :

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

TA_{it} = *Total Accruals* perusahaan i pada periode ke t

N_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

ΔRev_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t

PPE_t = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t

$\Delta Rect$ = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t

E = error

e. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Cash Flow Return on Assets* (CFROA). CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah Depresiasi dibagi dengan Total Aset.

$$CFROA = EBIT + \text{Depresiasi} \text{ dibagi Aset}$$

Dimana :

CFROA = *Cash Flow Return on Assets*

EBIT = Laba Sebelum Bunga dan Pajak

Depr = Depresiasi

Assets = Total Aktiva

Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Dewan Komisaris	Jumlah anggota Dewan Komisaris	Rasio
2	Komisaris Independen	Proporsi anggota Komisaris Independen	Rasio
3	Komite Audit	Proporsi anggota Komite Audit	Rasio
4	Manajemen Laba	Descretionary Accrual Modified Jones Model	Rasio
5	Kinerja Keuangan	Cash Flows Return on Assets	Rasio

Sumber : Variabel penelitian, diolah

3.4 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan aplikasi *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan program *Analysis of Moment Structure* (AMOS). Menurut Santoso (2011:5) bahwa SEM digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu yang melibatkan dua atau lebih variabel, baik variabel laten atau bukan.

Menurut Santoso (2014:14) ada beberapa tahapan pokok yang akan dilalui untuk menggunakan SEM dalam sebuah kegiatan penelitian.

1. Membuat sebuah Model SEM (*Model Specification*)
Pada tahap ini sebuah model dengan berdasar teori tertentu dibuat dalam bentuk *equation* maupun diagram. Diagram akan memasukkan *measurement model dan structural model*
2. Menyiapkan desain penelitian dan pengumpulan data
Sebelum model diuji, akan dilakukan pengujian asumsi-asumsi yang seharusnya dipenuhi dalam SEM, perlakuan terhadap *missing data*, mengumpulkan data

3. *Model Identification*

Model dilakukan uji identifikasi, apakah model dapat dianalisis lebih lanjut. Penghitungan besar *degree of freedom*

4. *Menguji Model (Model Testing dan Model Estimation)*

Menguji *measurement model dan structural model*, dari pengujian *measurement model* didapat keeratan hubungan antara indikator dengan konstruksinya. Jika *measurement model* dapat dianggap *valid*, pengujian dilanjutkan pada *structural model* untuk memperoleh sejumlah korelasi yang menunjukkan hubungan antar konstruk.

Untuk memberikan gambaran secara umum, data penelitian yang akan dilakukan analisis statistik deskriptif mengenai variabel-variabel penelitian, yakni Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Data penelitian tersebut dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk *Observer Variables dan Unobserver Variables*.

Uji Normalitas

Menurut Santoso (2011:69) dikatakan bahwa program SEM mensyaratkan data berdistribusi normal atau dianggap berdistribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan pada program AMOS mempunyai dua tahap. Pertama menguji normalitas untuk setiap variabel, sedangkan tahap kedua adalah pengujian normalitas untuk semua variabel secara bersama-sama yang disebut dengan *multivariate normality*.

Jika suatu variabel normal secara individual maka seharusnya juga variabel tersebut normal secara bersama-sama atau *multivariat*. Pengujian normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan program AMOS yaitu *assessment of normality*.

Uji Struktural Model

Model struktural adalah hubungan antara konstruk yang mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat. Menguji struktural model mempunyai dua bagian utama (Singgih Santoso : 133), yakni:

1. Menguji keseluruhan model (*overall model fit*) dari struktural model
2. Menguji structural parameter estimates, yakni hubungan diantara konstruk atau variabel independen-dependen yang ada dalam stuctural model.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan uji model dalam *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan menggunakan program *Analysis of Moment Structure* (AMOS). Pengujian dapat dilakukan bilamana besaran angka *degrees of freedom* (df) adalah positif, dan bilamana nol maka AMOS tidak bisa menghitung

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba serta implikasinya terhadap Kinerja Keuangan menggunakan program AMOS.

Dasar pengambilan keputusan masing-masing pengujian hipotesis dengan melihat probabilitasnya sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama, terdapat hubungan antara Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009 dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :
 - Jika $p > 0,05$ maka H_0 diterima
 - Jika $p < 0,05$ maka H_0 ditolak

2. Hipotesis kedua terdapat pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009 dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :
 - Jika $p > 0,05$ maka H_0 diterima
 - Jika $p < 0,05$ maka H_0 ditolak
3. Hipotesis ketiga terdapat pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009 dengan dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :
 - Jika $p > 0,05$ maka H_0 diterima
 - Jika $p < 0,05$ maka H_0 ditolak
4. Hipotesis keempat terdapat pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009 dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :
 - Jika $p > 0,05$ maka H_0 diterima
 - Jika $p < 0,05$ maka H_0 ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

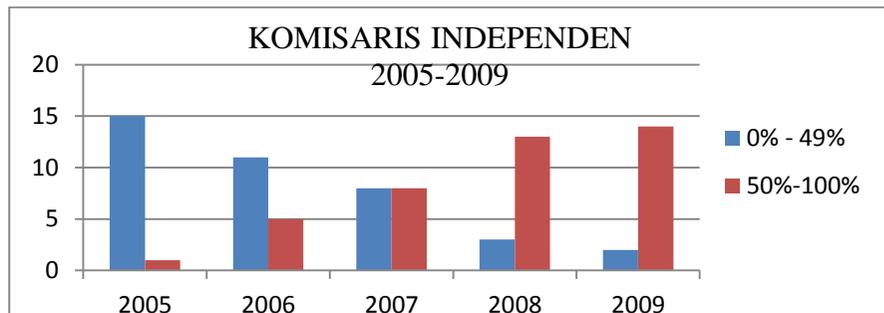
4.1 Deskripsi Data Penelitian

Hasil pengamatan terhadap proksi *Good Corporate Governance* seperti Komisaris Independen, Dewan Komisaris, dan Komite Audit sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Selama lima tahun mulai 2005-2009 variabel yang menjadi pengamatan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.1.1 Komisaris Independen

Gambar 4.1 memberikan ilustrasi Komisaris Independen dalam penelitian ini proporsinya terhadap jumlah Dewan Komisaris mengalami kecenderungan semakin membaik. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/14/PBI/2006, pasal 5 (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Proporsi Komisaris Independen pada penelitian yang komposisinya masih dibawah 50% mengalami penurunan, hingga pada akhir periode penelitian masih tersisa dua entitas.

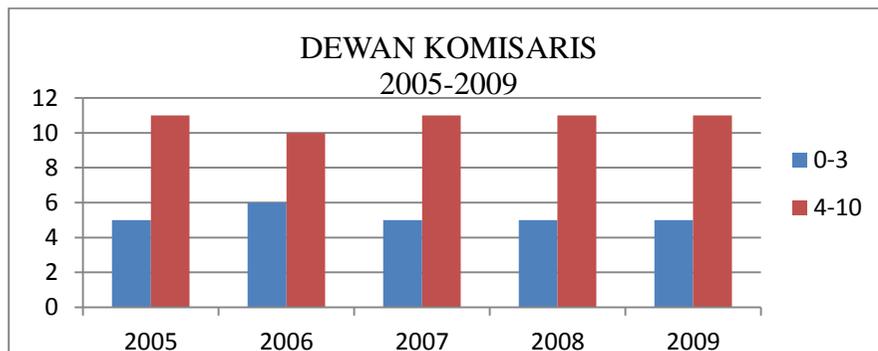


Sumber: Data Komisaris Independen Sampel Penelitian

Gambar 4.1 Data Komisaris Independen

4.1.2 Dewan Komisaris

Gambar 4.2 memberikan ilustrasi Dewan Komisaris dalam penelitian ini jumlahnya mengalami *stagnan*, tapi jumlah Dewan Komisaris cenderung pembengkakan hingga mencapai 10 personil. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006, pasal 4 (1) Jumlah anggota dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. (3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Pasal 5 (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.



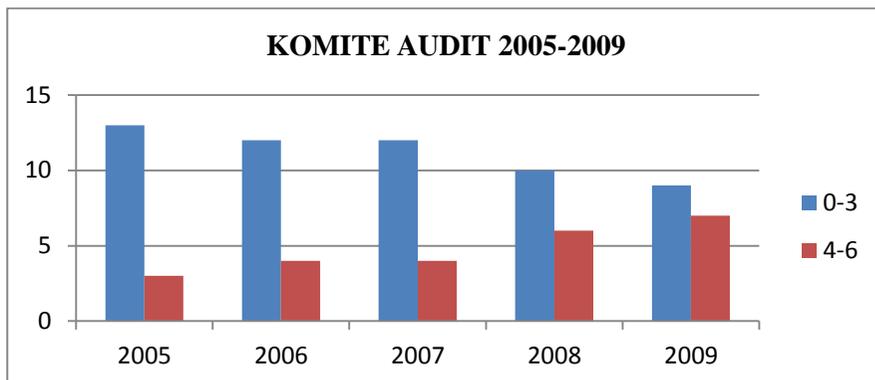
Sumber: Data Dewan Komisaris Sampel Penelitian

Gambar 4.2 Data Dewan Komisaris

4.1.3 Komite Audit

Gambar 4.3 memberikan ilustrasi keberadaan Komite Audit dalam penelitian ini jumlahnya ada kecenderungan bertambah hingga tahun 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006, pasal 38 (1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan c. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Diawal tahun penelitian yaitu tahun 2005 keberadaan Komite Audit entitas masih ada yang tidak memiliki Komite Audit. Keadaan ini semakin tahun mengalami kemajuan hingga pada akhir penelitian yaitu tahun 2009, entitas yang masih mempunyai komite audit ada tiga entitas.



Sumber: Data Komite Audit Sampel Penelitian

Gambar 4.3 Data Komite Audit

4.2 Uji Normalitas

Untuk memberikan jawaban atas hipotesis penelitian yang telah dirumuskan maka dalam Bab IV akan diuraikan hasil-hasil penelitian berupa beberapa pengujian, dan dilanjutkan dengan pembahasan hasil pengujian hipotesis. Uraian lebih terperinci antara lain meliputi: Uji Normalitas, Penyajian hasil analisis variabel eksogen dan endogen, pengujian hipotesis dengan menggunakan aplikasi *Structure Equation Modeling* (SEM) dengan program *Analysis Moment Of Structures* (AMOS)

Sebelum dilakukan analisis dan pengujian, perlu disajikan diskripsi variabel penelitian agar dapat memberikan gambaran mengenai keseluruhan variabel yang akan diukur pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* yang diproksi oleh variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009.

Untuk melakukan uji normalitas, aplikasi SEM dibantu dengan menggunakan program AMOS. Dan sebelumnya dapatlah

disajikan *variables count* yang merupakan variabel-variabel penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini. Pada tabel 4.1 *Variables Counts* disajikan beberapa variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Variables Counts

EXPLANATION	AMOUNT
Number of variables in your model	7
Number of observed variables	5
Number of unobserved variables	2
Number of exogenous variables	5
Number of endogenous variables	2

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Keseluruhan jumlah variabel yang akan diteliti dalam model ini berjumlah 7 variabel, yakni: variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Manajemen Laba, Kinerja Keuangan, error 1 dan error 2. Sedangkan variabel yang diobservasi atau diteliti meliputi: variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Variabel-variabel eksogen merupakan variabel independen yang akan diukur pengaruhnya terhadap variabel indogen.

Sedangkan deskripsi variabel penelitian tampak pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2. Deskripsi Variabel Penelitian

OBSERVED VARIABLES		UNOBSERVED VARIABLES
ENDOGENOUS VARIABLES	EXOGENOUS VARIABLES	EXOGENOUS VARIABLES
Manajemen Laba	Dewan Komisaris	Error 1
Kinerja Keuangan	Komisaris Independen	Error 2
	Komite Audit	

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Hasil analisis program AMOS pada Tabel 4.2 mendiskripsikan variabel penelitian menjadi dua yakni *observed variables* dan *unobserved variables*. *Observed variables* meliputi *endogenous variables* atau variabel endogen atau variabel dependen dan *exogenous variables* atau variabel eksogen atau variabel independen. Sedangkan *unobserved variables* merupakan *exogenous variables* yang tidak diteliti yakni error 1 dan error 2.

Observed Exogenous Variables atau variabel eksogen atau variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini meliputi : variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit. Variabel-variabel ini terkait dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Variabel Dewan Komisaris dalam penelitian ini diukur dengan Jumlah anggota Dewan Komisaris, paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi, PBI (2006: pasal 4). Sedangkan Variabel Komisaris Independen diukur dengan proporsi Dewan Komisaris paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris, PBI (2006: pasal 5).

Variabel Komite Audit dalam penelitian ini diukur dengan proporsi anggota Komite Audit. PBI (2006: pasal 38) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota. Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari:

- a. Seorang Komisaris Independen;
- b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan
- c. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model penelitian memiliki distribusi data yang normal sehingga hasil analisisnya tidak bias. Untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal, SEM dengan program AMOS mempunyai dua tahapan pengujian. Menurut Santoso (2011: 71) pertama menguji normalitas untuk setiap variabel, sedangkan tahap kedua adalah pengujian normalitas untuk semua variabel secara bersama-sama yang disebut dengan *multivariate normality*.

Berikut ini hasil uji normalitas data yang dianalisis oleh program AMOS, dalam bentuk Tabel *Assessment of normality* sebagai berikut :

Tabel 4.3. *Assessment of normality*

Variable	Min	Max	Skew	c.r.	kurtosis	c.r.
KOMITE AUDIT	.000	1.820	-.436	-1.552	-1.739	-3.095
KOMISARIS INDEPENDEN	.000	2.000	-1.506	-5.359	.472	.840
DEWAN KOMISARIS	1.820	2.520	-.078	-.278	-1.254	-2.231
MANAJEMEN LABA	-	.000	1.510	5.374	1.015	1.805
KINERJA KEUANGAN	2.000	1.220	-.227	-.807	-.437	-.777
Multivariate					-.434	-.226

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Dalam Tabel 4.3 *Assessment of normality* tersebut di atas terdapat dua bagian utama yang perlu diperhatikan terkait dengan uji normalitas data. Menurut Sulistyanto (2014:81), Bagian pertama mengenai *critical ratio*, dan bagian kedua *standard error*. Masing-masing bagian tersebut memiliki tahapan perhitungan sebagai berikut :

1. Menghitung *critical ratio skewness* atau tingkat kemencengan sebuah variabel, dengan melalui proses :

a. Menghitung *standard error* atas *skewness*, dengan rumus :

$$s.e = \sqrt{6/N}, \text{ dimana } N \text{ adalah jumlah sampel}$$

b. Menghitung *critical ratio skewness*, dengan rumus :

$$Cr = \frac{\text{Skewness_sample}}{s.e}$$

2. Menghitung *critical rasio kurtosis* atau tingkat keruncingan sebuah variabel, dengan melalui proses :

a. Menghitung *standard error* atas *kurtosis* dengan rumus :

$$s.e = \sqrt{24/N}, \text{ dimana } N \text{ adalah jumlah sampel}$$

b. Menghitung *critical ratio kurtosis* dengan rumus :

$$Cr = \frac{\text{Kurtosis_sampel}}{s.e}$$

3. Menghitung data secara keseluruhan (*multivariate*), dengan proses :

a. Menghitung *standard error multivariate* dengan rumus :

$$s.e = \frac{\sqrt{8p(p+2)}}{N}$$

b. Menghitung *critical ratio kurtosis* dengan rumus :

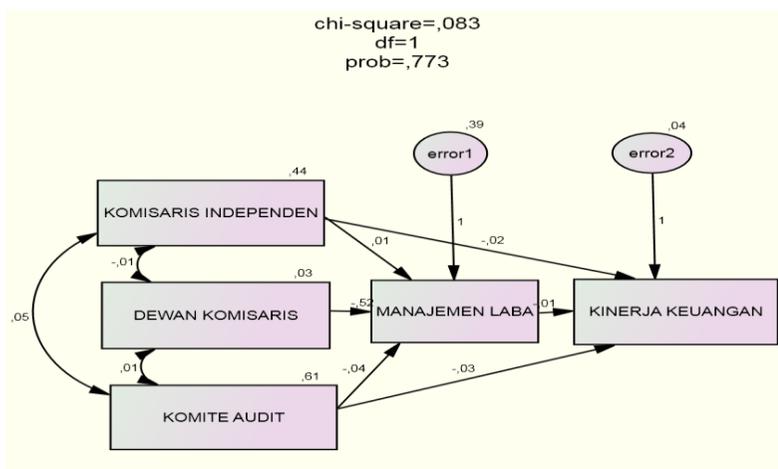
$$cr = \frac{\text{Angka_multivariat}}{s.e}$$

Sebuah distribusi data penelitian dapat dikatakan normal jika angka *critical ratio skewness* atau *critical ratio kurtosis* berkisar diantara angka -2,58 sampai +2,58. Tabel 4.3 *Assessment of normality* ternyata menunjukkan data penelitian ini mempunyai pola distribusi yang normal, terbukti secara *Multivariat*, keseluruhan

variabel dalam penelitian ini mempunyai *cr multivariates* yang normal yakni sebesar -0,226. Karena itu secara *multivariat* dapat dikatakan bahwa distribusi data penelitian yang digunakan dalam model penelitian ini dianggap berdistribusi normal.

Komite audit, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba mempunyai nilai *cr* diluar angka -2,58 sampai +2,58. Namun variabel tersebut mempunyai nilai kurtosis jauh dibawah ketentuan yang dipersyaratkan. Untuk itu menurut Santoso (2014:90), secara umum dapat dikatakan bahwa distribusi data yang digunakan dalam model dapat dianggap berdistribusi normal.

4.3 Uji Struktural Model



Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Gambar 4.4 Model Struktural

Dalam uji struktural model akan ditunjukkan hubungan antara konstruk yang mempunyai hubungan kausal, Santoso (2011:134). Dengan demikian akan ada variabel independen dan

variabel dependen. Struktur model dalam penelitian ini tampak pada gambar 4.4 tersebut..

Pada Struktur Model diatas terdiri atas Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit sebagai proksi *Good Corporate Governance* merupakan variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap Manajemen Laba. Sedangkan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan, dan pengaruh variabel Manajemen Laba terhadap Kinerja keuangan.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa manajemen laba dan kinerja keuangan suatu entitas *go public* diprediksi dipengaruhi (tergantung) pada dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit. Sulistyanto (2008:143) menyatakan direksi dan dewan komisaris merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan *corporate governance*, sedangkan komite audit mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan independen atas pelaksanaan proses pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan.

Pengujian terhadap *structural model* dalam program AMOS dilakukan menurut Santoso (2011:133) meliputi dua bagian utama : (1) menguji *overall model fit* dari *structural model*, (2) menguji *structural parameter estimates*, yakni hubungan diantara konstruk atau variabel independen yang ada dalam *structural model*.

Hasil uji *overall model fit* (keseluruhan model) tampak pada *Notes for Model* yang dihasilkan program AMOS berikut ini :

Tabel 4.4. *Notes for model*

EXPLANATION	AMOUNT
Computation of degrees of freedom (Default model)	
Number of distinct sample moments	15
Number of distinct parameters to be estimated	14
Degrees of freedom (15-14)	1
Result (Default model)	
Chi-Square	0,083
Probability Level	0,773

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Dalam Tabel 4.5 *Notes for model* ternyata *probability level* adalah sebesar 0,773, suatu nilai *probability* yang jauh diatas 0,05 menunjukkan bahwa secara keseluruhan (*overall*) model diatas telah *fit* dengan data sampel, Santoso (2011:119).

Sedangkan *out put model fit* dalam program AMOS ditunjukkan dengan nilai-nilai antara lain :

- a. CMIN atau *Minimum Discrepancy*;
- b. RMR atau *Root Mean Residual* ;
- c. GFI atau *Goodness of Fit Index*.

Tabel 4.5. Minimum Descrepancy

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	14	.083	1	.773	.083
Saturated model	15	.000	0		
Independence model	5	5.840	10	.829	.584

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Dalam Tabel 4.6 ternyata nilai *p* sebesar 0,773 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa model penelitian ini dianggap *fit* dengan data-data sampel penelitiannya. Menurut Santoso

(2011:147) angka p yang jauh lebih besar dari 0,05 menunjukkan model dapat dianggap *fit* dengan data yang ada.

Demikian pula dengan nilai *The Minimum Sample Discrepancy Function* (CMIN) sebesar 0,525 berada diantara nilai *Saturated Model* dan *Independence Model*.

Tabel 4.6. *Root Mean Residual, Goodness of Fix Index, Adjusted Goodness of Fix Index*

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	.000	1.000	.993	.067
Saturated model	.000	1.000		
Independence model	.018	.970	.954	.646

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Dengan Tabel 4.6 ternyata bahwa nilai *Goodness of Fix Index* (GFI) dan *Adjusted Goodness of Fix Index* (AGFI) masing-masing menunjukkan nilai 1,000 dan 0,993 yang mendekati angka 1. Menurut Santoso (2011:180) bahwa GFI yang direkomendasikan adalah yang mendekati angka 1. Dibagian lain nilai *Root Mean Residual* (RMR) sebesar 0,00 yang relatif mendekati angka nol. Menurut Singgih Santoso (2011:181) semakin kecil hasil RMR pada umumnya dibawah 0,1 tentu akan semakin baik, yang menandakan semakin dekatnya angka pada sampel dengan estimasinya. Keempat unsur tersebut yakni : CMIN, *Goodness of Fit Index* (GFI), *Adjusted Gppdmess pf Fot Index* (AGFI) dan *Root Mean Residual* (RMR) mengindikasikan adanya dukungan terhadap model bahwa model telah *fit*.

4.4 Analisis Pengujian Hipotesis

Dilakukan Uji normalitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa model penelitian memiliki distribusi data yang normal

sehingga hasil analisisnya tidak bias. Setelah uji normalitas dilanjutkan dengan uji hipotesis berdasarkan struktur model penelitian yang telah *fit*. Agar dapat menjelaskan berbagai hubungan dan pengaruh antar variabel yang diteliti maka pengujian hipotesis dilakukan secara bertahap yakni sebagai berikut :

- (1) Menguji *covariances exogenous variables* yaitu menguji hubungan antar variabel Komisaris Independen, Dewan Komisaris, dan Komite Audit sebagai proksi *Good Corporate Governance* Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*;
- (2) Menguji hipotesis pengaruh variabel Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Komite Audit sebagai proksi *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*;
- (3) Menguji hipotesis pengaruh variabel Komisaris Independen, Komite Audit sebagai proksi *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*;
- (4) Menguji hipotesis pengaruh praktik Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*.

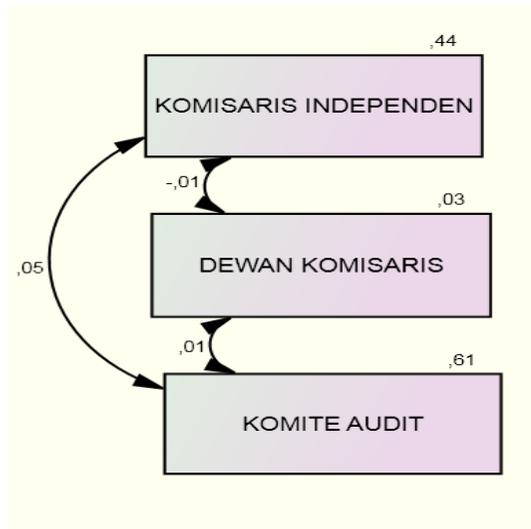
4.4.1. Hubungan antar *covariances exogenous variables* Komisaris Independen, Dewan Komisaris dan Komite Audit

Pengujian hipotesis pertama untuk menguji *Covariances exogenous variables* dilakukan dengan menggunakan program *Analysis of Moment Structure (AMOS)*. Pengujian *covariances* ini dimaksudkan untuk menguji apakah ada hubungan diantara variabel eksogen yakni : Komisaris Independen, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sejuahmana hubungan antara Komisaris

Independen dengan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dengan Komite Audit, dan Komisaris Independen dengan Komite Audit.

Agar hasil pengujian *covariances exogenous variables* lebih terinci maka dilakukan pengujian dengan beberapa tahapan sebagai berikut : (1) menguji hubungan Komisaris Independen dengan Dewan Komisaris Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*; (2) menguji hubungan Dewan Komisaris dengan Komite Audit Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*; (3) menguji hubungan antara Komisaris Independen dengan Komite Audit Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*.

Hasil pengujian dengan program AMOS menghasilkan berbagai hubungan antar variabel eksogen seperti tampak pada Gambar 4.5 berikut :



Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Gambar 4.5 Hasil Pengujian *Covariances Exogenous Variables*

Pada Gambar 4.5 tersebut ditunjukkan berbagai hubungan antar variabel eksogen dalam *covariances exogenous variables*.

- (1) Hubungan antara variabel eksogen Komisaris Independen dengan Dewan Komisaris ditunjukkan dalam tabel 4.8 *covariances exogenous variables*. Komisaris Independen dengan Dewan Komisaris dengan nilai p sebesar $0,402 > 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya bahwa tidak ada hubungan yang nyata antara Komisaris Independen dengan Dewan Komisaris.
- (2) Hubungan antara variabel eksogen Dewan Komisaris dengan Komite Audit ditunjukkan dalam tabel 4.8 *covariances exogenous variables*. Dewan Komisaris dengan Komite Audit dengan nilai p sebesar $0,591 > 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya bahwa tidak ada hubungan yang nyata antara Dewan Komisaris dengan Komite Audit.
- (3) Hubungan antara variabel eksogen Komisaris Independen dengan Komite Audit ditunjukkan dalam tabel 4.8 *covariances exogenous variables*. Dewan Komisaris dengan Komite Audit dengan nilai p sebesar $0,376 > 0,05$ maka H_0 diterima artinya bahwa tidak ada hubungan yang nyata antara Komisaris Independen dengan Komite Audit. Dasar pengambilan keputusan menurut Santoso (2011:144) bahwa angka p dibawah $0,05$ maka H_0 ditolak atau ada hubungan yang nyata.

Dalam pengujian hubungan antar variabel eksogen memberikan informasi tentang *output estimates covariance* yang menunjukkan besarnya nilai *estimate covariance* dan *output estimate* yang menunjukkan besarnya nilai *estimate correlation*. *Covariances Exogenous Variables* ditunjukkan pada Tabel 4.7, sedangkan *Correlation Exogenous Variables* ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Besaran nilai probabilitas pada *Covariances Exogenous Variables* menunjukkan adanya hubungan nyata atau tidak nyata, signifikan atau tidak signifikan antar variabel eksogen. Nilai *p* dipakai untuk mengukur apakah suatu hubungan variabel eksogen terindikasi mempunyai hubungan nyata/signifikan atau tidak nyata/tidak signifikan. Sedangkan nilai *estimate* pada *correlation exogenous variables* menunjukkan adanya keeratan hubungan antar variabel eksogen.

Tabel 4.7. Hasil Pengujian *Covariances exogenous variables*

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
KOMISARIS INDEPENDEN	<-->	DEWAN KOMISARIS	-.012	.014	-.837	.402	par_1
DEWAN KOMISARIS	<-->	KOMITE AUDIT	.009	.016	.537	.591	par_2
KOMISARIS INDEPENDEN	<-->	KOMITE AUDIT	.053	.060	.885	.376	par_3

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Hasil pengujian juga menginformasikan adanya angka korelasi antar variabel eksogen yang menunjukkan keeratan hubungan antar variabel eksogen atau *Correlation Exogenous Variables* yakni Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Komite Audit yang berbeda-beda. Menurut Santoso (2011:143) korelasi dibawah angka korelasi 0,5 hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi yang erat.

Komisaris Independen dengan Dewan Komisaris memiliki angka *estimate* negatif -0,097 lebih kecil dari 0,50 yang menandakan bahwa hubungannya kurang erat, demikian pula hubungan Dewan Komisaris dengan Komite Audit mempunyai nilai *estimate* sebesar 0,062 masih dibawah 0,50 yang menandakan hubungan kurang erat, Komisaris Independen dengan Komite Audit mempunyai nilai

estimate sebesar 0,103 lebih kecil dari 0,50 yang menandakan hubungannya juga kurang erat.

Tabel 4.8. Hasil Pengujian *Correlation Exogenous Variables*

			<i>Estimate</i>
DEWAN KOMISARIS	<-->	KOMISARIS INDEPENDEN	-.097
KOMISARIS INDEPENDEN	<-->	KOMITE AUDIT	.103
DEWAN KOMISARIS	<-->	KOMITE AUDIT	.062

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Gunarianto (2010:123) mengutip Sevilla tahun 1997 (Agoes, 2003:155) mengklasifikasikan koefisien korelasi menjadi lima kategori seperti pada Tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.9. Kategori Keeratan Koefisien Korelasi

NO	KOEFISIEN KORELASI	INDIKASI
1	Antara +/- 0,80 sampai 1,00	<i>High correlation</i>
2	Antara +/- 0,60 sampai 0,79	<i>Moderately high correlation</i>
3	Antara +/- 0,40 sampai 0,59	<i>Moderate correlation</i>
4	Antara +/- 0,20 sampai 0,39	<i>Low correlation</i>
5	Antara +/- 0,10 sampai 0,19	<i>Negligible correlation</i>

Sumber : Sevilla, 1997; Agoes, 2003 dalam Gunarianto, 2010

Korelasional masing-masing variabel eksogen pada Tabel 4.9 dan besaran koefisien korelasi dan kriteria mengenai keeratan hubungan tersebut pada Tabel 4.10, Keeratan hubungan antar variabel eksogen dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Korelasi antara variabel Komisaris Independen dengan Dewan Komisaris sebesar *estimate* -0,097. Angka -0,097 menunjukkan bahwa hubungan antar konstruk atau

- variabel Komisaris Independen dengan Dewan Komisaris adalah *negligible correlation* dengan arah hubungan negatif.
- (2) Koefisien korelasi antara variabel Komisaris Independen dengan Komite Audit sebesar *estimate* 0,103. Angka 0,103 menunjukkan bahwa hubungan antar konstruk atau variabel komisaris independen dengan komite audit adalah *negligible correlation*, dengan arah hubungan positif
 - (3) Koefisien korelasi antara variabel Dewan Komisaris dengan Komite Audit sebesar *estimate* 0,062. Angka 0,062 menunjukkan bahwa hubungan antar konstruk atau variabel dewan komisaris dengan komite audit adalah *negligible correlation* dengan arah hubungan positif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai *covariances* dan *correlation* bervariasi diantara variabel eksogen dalam rangka *Good Corporate Governance* yakni : hubungan Dewan Komisaris dengan Komisaris Independen, hubungan Komisaris Independen dengan Komite Audit, dan hubungan Dewan Komisaris dengan Komite Audit pada Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009.

Covariances masing-masing variabel eksogen tersebut, secara keseluruhan mempunyai hubungan yang bersifat tidak nyata, karena nilai *estimate* masing-masing variabel eksogen berada dibawah 0,5.

4.4.2. Pengaruh variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Pengujian hipotesis kedua untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang nyata antara Dewan

Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*.

Pengujian hipotesis untuk menguji hipotesis pengaruh *Good Corporate Governance* dengan proksi Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* dilakukan beberapa tahap pengujian sebagai berikut : (1) menguji pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*; (2) menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*; (3) menguji pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*;

Hasil pengujian menginformasikan bahwa tingkat signifikansi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen tertera dengan nilai probabilitas pada Tabel *Regression Weight*. Sedangkan keeratan korelasi variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat dilakukan dengan melihat nilai *estimate* pada Tabel *Standardized Regression Weight*.

Tabel 4.10. Hasil Pengujian *Regression Weights*

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
MANAJEMEN LABA	<---	KOMISARIS INDEPENDEN	.011	.110	.099	.921	par_4
MANAJEMEN LABA	<---	KOMITE AUDIT	-.036	.093	-.385	.700	par_5
MANAJEMEN LABA	<---	DEWAN KOMISARIS	-.523	.401	-1.304	.192	par_7

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Regression Weight menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh suatu variabel independen dalam penelitian terhadap variabel dependen. Untuk kepraktisan dapat langsung dilihat pada

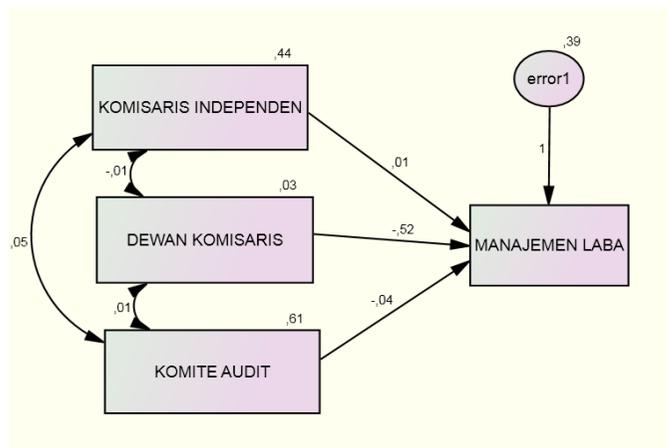
kolom P (*probability*) : Jika $p > 0,05$ maka H_0 diterima, jika $p < 0,05$ maka H_0 ditolak, Santoso (2011:142)

Tabel 4.11. Hasil Pengujian *Standardized Regression Weights*

			Estimate
MANAJEMEN LABA	<---	KOMISARIS INDEPENDEN	.011
MANAJEMEN LABA	<---	KOMITE AUDIT	-.044
MANAJEMEN LABA	<---	KOMISARIS INDEPENDEN	-.150

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Standardized Regression Weight menunjukkan keeratan korelasi, bila angka korelasi dibawah 0,5 hal tersebut menunjukkan tidak adanya korelasi yang erat, Santoso (2011:143). Hasil analisis memberikan hasil pengaruh variabel eksogen/independen terhadap variabel endogen/dependen seperti tampak pada Gambar 4.6 berikut ini.



Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Gambar 4.6 Hasil Pengujian Pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen

(1) Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Regression Weights menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh variabel Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. Nilai probabilitas yang ditunjukkan dalam Tabel 4.11 adalah sebesar $0,921 > 0,05$ artinya H_0 diterima atau sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata atau pengaruhnya tidak signifikan variabel Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba ditolak. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public tahun 2005-2009.

Sedangkan *Standardized Regression Weights* merupakan nilai yang menunjukkan tingkat keeratan korelasi variabel Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. Nilai *estimate* yang ditunjukkan dalam tabel 4.12 adalah sebesar $-0,011 < 0,5$ yang menunjukkan tidak adanya korelasi yang erat variabel Komisaris Independen dengan Manajemen Laba.

(2) Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Regression Weights menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh variabel Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba. Nilai probabilitas yang ditunjukkan dalam tabel 4.11 adalah sebesar $0,192 > 0,05$ artinya H_0 diterima atau sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata atau pengaruh tidak signifikan variabel Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba ditolak. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa Dewan

Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009.

Sedangkan *Standardized Regression Weights* yang dihasilkan menunjukkan tingkat keeratan korelasi variabel Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba. Nilai *estimate* yang ditunjukkan dalam tabel 4.12 sebesar $-0,150 < 0,5$ yang menunjukkan tidak adanya korelasi yang erat variabel Dewan Komisaris dengan Manajemen Laba.

(3) Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba Bank

Regression Weights menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh variabel Komite Audit terhadap Manajemen Laba. Nilai probabilitas yang ditunjukkan dalam tabel 4.11 adalah sebesar $0,700 > 0,05$ artinya H_0 diterima atau sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata atau pengaruh tidak signifikan variabel Komite Audit terhadap Manajemen Laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba ditolak. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009.

Sedangkan *Standardized Regression Weights* yang dihasilkan menunjukkan tingkat keeratan korelasi variabel Komite Audit terhadap Manajemen Laba. Nilai *estimate* yang ditunjukkan dalam tabel 4.12 sebesar $-0,044 < 0,5$ yang menunjukkan tidak adanya korelasi yang erat variabel Komite Audit dengan Manajemen Laba.

4.4.3. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, terhadap Kinerja Keuangan

Pengujian hipotesis ketiga untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang nyata antara Komisaris Independen, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*.

Dalam melakukan pengujian terhadap hipotesis ketiga perlu dilakukan beberapa tahap pengujian agar diperoleh informasi pengaruh yang terinci yakni sebagai berikut : (1) menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*; (2) menguji pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public*.

Hasil pengujian menginformasikan bahwa tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tertera dengan nilai probabilitas pada Tabel *Regression Weight*. Sedangkan keeratan korelasi variabel independen terhadap variabel dependen tertera dengan nilai *estimate* pada Tabel *Standardized Regression Weight*.

Tabel 4.12. Hasil Pengujian *Regression Weights*

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
KINERJA KEUANGAN	<---	MANAJEMEN LABA	-.015	.036	-.406	.685	par_6
KINERJA KEUANGAN	<---	KOMISARIS INDEPENDEN	-.024	.034	-.700	.484	par_8
KINERJA KEUANGAN	<---	KOMITE AUDIT	-.031	.029	-1.066	.286	par_9

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

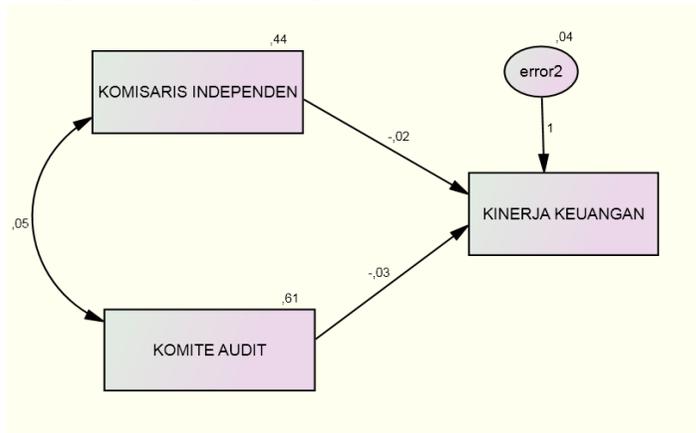
Regression Weight menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk kepraktisan dapat langsung dilihat pada kolom *P (probability)* : Jika $p > 0,05$ maka H_0 diterima, jika $p < 0,05$ maka H_0 ditolak.

Tabel 4.13. Hasil Pengujian *Standardized Regression Weights*

	Estimate
KINERJA KEUANGAN <--- MANAJEMEN LABA	-.046
KINERJA KEUANGAN <--- KOMISARIS INDEPENDEN	-.080
KINERJA KEUANGAN <--- KOMITE AUDIT	-.122

Sumber : Hasil Analisis Program AMOS

Sedangkan *Standardized Regression Weights* menunjukkan keeratan korelasi. Bila dibawah angka korelasi 0,5 hal tersebut menunjukkan tidak adanya korelasi yang erat. Hasil Analisis memberikan hasil gambar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen seperti tampak berikut ini.



Sumber : Hasil analisis AMOS

Gambar 4.7 Hasil Pengujian Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

(1) Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Regression Weights menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh variabel Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan. Nilai probabilitas yang ditunjukkan dalam tabel 4.13 adalah p sebesar $0,484 > 0,05$ artinya H_0 diterima atau sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata atau tidak ada pengaruh signifikan variabel Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan ditolak. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009.

Sedangkan *Standardized Regression Weights* menunjukkan tingkat keeratan korelasi variabel Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan. Nilai *estimate* yang ditunjukkan dalam tabel 4.14 adalah sebesar $-0,080 < 0,5$ yang menunjukkan adanya korelasi yang tidak erat Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan.

(2) Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Regression Weights menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan. Nilai probabilitas yang ditunjukkan dalam tabel 4.13 adalah p sebesar $0,286 > 0,05$ artinya H_0 diterima atau sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata atau tidak ada pengaruh signifikan variabel Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan diterima. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009

Sedangkan *Standardized Regression Weights* menunjukkan tingkat keeratan korelasi variabel Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan. Nilai *estimate* yang ditunjukkan dalam tabel 4.14 adalah sebesar $0,122 < 0,5$ yang menunjukkan tidak adanya korelasi yang erat Komite Audit dengan Kinerja Keuangan.

4.4.4. Pengaruh Manajemen Laba terhadap kinerja keuangan

Regression Weights menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh manajemen laba terhadap Kinerja Keuangan. Nilai probabilitas yang ditunjukkan dalam tabel 4.13 adalah p sebesar $0,685 > 0,05$ artinya H_0 diterima atau sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata atau tidak ada pengaruh signifikan variabel manajemen laba terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan ditolak. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa Manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009

Sedangkan *Standardized Regression Weights* menunjukkan tingkat keeratan korelasi variabel manajemen laba terhadap Kinerja Keuangan. Nilai *estimate* yang ditunjukkan dalam tabel 4.14 adalah sebesar $-0,046 < 0,5$ yang menunjukkan tidak adanya korelasi yang erat Manajemen Laba dengan Kinerja Keuangan.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan *Analysis of Moment Structures (AMOS)*, dapatlah dijelaskan secara keseluruhan hubungan dan pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dalam hal ini Komisaris Independen, Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba

dan Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009.

4.5.1 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Sebagai bagian dari *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan menjadi dipersyaratkan oleh regulator Bank Indonesia melalui PBI Nomor : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Kovarians atau hubungan dua variabel yang bersifat dua arah antara Komisaris Independen dengan Dewan Komisaris mempunyai nilai p sebesar 0,402. Bilamana nilai $p > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti hubungan yang tidak nyata atau tidak berpengaruh antara Komisaris Independen dengan Dewan Komisaris. Sedangkan angka korelasi kedua variabel tersebut mempunyai nilai *estimate* -0,097 menunjukkan suatu hubungan yang tidak erat dengan arah yang negatif.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa jumlah keanggotaan Dewan Komisaris di industri Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* di BEI tahun 2005-2009 tidak secara proporsional menjadi bagian dari keanggotaan Komisaris Independen. Pengangkatan Dewan Komisaris semata untuk memenuhi kebutuhan pejabat di bank sebagai antisipasi terhadap perkembangan organisasi dan perkembangan usaha bank, tetapi tidak untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan manajemen. Dewan Komisaris dalam entitas penelitian ini tidak secara otomatis memiliki Komisaris Independen seperti yang diharapkan dalam PBI nomor

8/4/2006 dan PBI nomor 8/14/2006. Pasal 5 (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Proporsi Komisaris Independen selama penelitian ini masih masih terdapat yang dibawah 50%, dan yang tidak memiliki Komisaris Independen.

Kovarians Komisaris Independen dengan Komite Audit mempunyai nilai p sebesar 0,376. Biamana nilai $p > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti hubungan yang tidak nyata atau tidak berpengaruh antara Komisaris Independen dengan Komite Audit. Sedangkan angka korelasi kedua variabel tersebut mempunyai nilai *estimate* 0,103 menunjukkan hubungan yang tidak erat dengan arah yang positif.

Kenyataann ini menunjukkan bahwa jumlah keanggotaan Komisaris Independen di industri Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* di BEI tahun 2005-2009 tidak secara proporsional menjadi bagian dari keanggotaan Komite Audit. Pengangkatan Dewan Komisaris yang tidak berimbang dengan pengangkatan keanggotaan sebagai Komisaris Independen berakibat pada keanggotaan Komite Audit yang tidak proporsional seperti yang diharapkan dalam PBI nomor 8/4/2006 dan PBI nomor 8/14/2006. Pasal 38 (1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan c. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Pasal 38 ayat 4 bahwa Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit

Kovarians Dewan Komisaris dengan Komite Audit mempunyai nilai p sebesar 0,591. Karena nilai $p > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti hubungan yang tidak nyata atau tidak berpengaruh antara Dewan Komisaris dengan Komite Audit. Sedangkan angka korelasi kedua variabel tersebut mempunyai nilai *estimate* 0,062 menunjukkan hubungan yang tidak erat dengan arah yang positif.

Dalam penelitian ini bahwa Komisaris Independen dengan Dewan Komisaris sesungguhnya tidak mempunyai hubungan yang nyata, sedangkan Komisaris Independen dengan Komite Audit hubungannya juga tidak nyata, berarti Dewan Komisaris dengan Komite Audit juga hubungannya tidak nyata. Kenyataan ini menunjukkan bahwa jumlah keanggotaan Dewan Komisaris di industri Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* di BEI tahun 2005-2009 tidak secara proporsional menjadi bagian dari keanggotaan Komisaris Independen dan Komite Audit. Pengangkatan Dewan Komisaris yang tidak menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan keanggotaan sebagai keanggotaan Komite Audit, seperti yang diharapkan dalam PBI nomor 8/4/PBI/2006, pasal 12 (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: a. Komite Audit;

4.5.2 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian statistik pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba menunjukkan pengaruh yang tidak nyata atau tidak signifikan. Pengujian pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba menunjukkan nilai *probability* 0,192 > 0,05 dimana angka tersebut jauh diatas 0,05 sehingga H_0 diterima yang berarti

sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata (signifikan) atau tidak ada pengaruh antara Dewan Komisaris dengan Manajemen Laba. Sedangkan angka korelasi Dewan Komisaris dengan Manajemen Laba mempunyai nilai korelasi dengan *estimate* -0,150 yang jauh dibawah 0,5. Hal ini menunjukkan tidak ada korelasi yang erat antara Dewan Komisaris dengan Manajemen Laba.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Eka (2005), Ujianto dan Bambang (2007). Namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wedari (2004), Nasution dan Dody (2007).

Pengujian pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba menunjukkan nilai *probability* 0,921 > 0,05 dimana angka tersebut jauh diatas 0,05 sehingga H_0 diterima yang berarti sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata (signifikan) atau tidak ada pengaruh antara Komisaris Independen dengan Manajemen Laba. Sedangkan angka korelasi Komisaris Independen dengan Manajemen Laba mempunyai nilai korelasi dengan *estimate* 0,011 yang jauh dibawah 0,5. Hal ini menunjukkan tidak ada korelasi yang erat antara Komisaris Independen dengan perilaku Manajemen Laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ujianto dan Pramuka (2007), Samani (2008)

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ujiantho dan Bambang (2007), Nasution dan Setiawan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Nasution dan Doddy (2007), secara empiris menemukan komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan.

Pengujian pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba menunjukkan nilai *probability* 0,700 > 0,05 dimana angka

tersebut jauh diatas 0,05 sehingga H_0 diterima yang berarti sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata (signifikan) atau tidak ada pengaruh antara Komite Audit dengan Manajemen Laba. Sedangkan angka korelasi Komite Audit dengan Manajemen Laba mempunyai nilai korelasi dengan *estimate* -0,044 yang jauh dibawah 0,5. Hal ini menunjukkan tidak ada korelasi yang erat antara Komite Audit dengan perilaku Manajemen Laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Marihot Nasution (2006).

Namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Bahtiar (2004), Wedari (2004), Carcello et al (2006), Nasution dan Dody (2007), Edgina Antonia (2008). Marihot Nasution et.al (2007) secara empiris menemukan variabel keberadaan komite audit terhadap akrual kelolaan menunjukkan adanya pengaruh negatif variabel yang signifikan.

Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa tindakan Manajemen Laba yang diformulasikan dengan *modified model Jones* dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit dengan pengaruhnya yang tidak nyata atau tidak pengaruh signifikan. Hasil pengujian hipotesis ini menambah kajian teori yang telah ada sebelumnya tentang Manajemen Laba.

4.5.3 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian statistik pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan tidak terdapat hubungan yang nyata atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Pengujian pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan nilai *probability* 0,484 > 0,05 dimana angka tersebut jauh diatas 0,05 sehingga H_0 diterima yang berarti sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata (signifikan)

atau tidak ada pengaruh antara Komisaris Independen dengan Kinerja Keuangan. Sedangkan angka korelasi Komisaris Independen dengan Kinerja Keuangan mempunyai nilai korelasi dengan *estimate* -0,080 yang jauh dibawah 0,5. Hal ini menunjukkan tidak ada korelasi yang erat antara Komisaris Independen dengan Kinerja Keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Samani (2008), Kusumawati dan Riyanto (2005).

Pengujian pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan nilai *probability* 0,286 > 0,05 dimana angka tersebut jauh diatas 0,05 sehingga H_0 diterima yang berarti sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata (signifikan) atau tidak ada pengaruh antara Komite Audit dengan Kinerja Keuangan. Sedangkan angka korelasi Komite Audit dengan Kinerja Keuangan mempunyai nilai korelasi dengan *estimate* -0,122 yang jauh dibawah 0,5. Hal ini menunjukkan tidak ada korelasi yang erat antara Komite Audit dengan Kinerja Keuangan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Samani (2008) menyatakan Komite Audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari (2004), Wilopo (2004), tetapi berbeda dengan Nuryamah (2004).

4.5.4 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Hasil pengujian statistik pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan tidak terdapat hubungan yang nyata atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Pengujian pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan nilai *probability* 0,685 > 0,05 dimana angka tersebut jauh diatas 0,05 sehingga H_0 diterima yang berarti sesungguhnya tidak ada hubungan yang nyata (signifikan) atau tidak ada pengaruh antara Manajemen Laba dengan Kinerja Keuangan.

Sedangkan angka korelasi Komisaris Independen dengan Kinerja Keuangan mempunyai nilai korelasi dengan *estimate* -0,046 yang jauh dibawah 0,5. Hal ini menunjukkan tidak ada korelasi yang erat antara Manajemen Laba dengan Kinerja Keuangan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Farida et. al., yang melakukan penelitian terhadap perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2005-2007. Hasil penelitiannya, menurut Farida, et.al (2010:79) menemukan secara empiris bahwa (1) tindakan *earnings management* tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja keuangan di perusahaan perbankan indonesia, (2) tidak ada hubungan penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan yang dimediasi oleh tindakan *earning management* dalam perusahaan perbankan Indonesia. Penelitian Yusriati et.al (2010), menyatakan bahwa tindakan *earnings management* tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan di perusahaan perbankan Indonesia. Penelitian yang sama dilakukan oleh Rudi (2008) menyatakan Manajemen Laba tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan.

Hasil penelitian berbeda yang dilakukan Paramita Rika Sar (2008) menyatakan terdapat pengaruh secara signifikan positif manajemen laba sebagai pengukur *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Theresia (2005) menyatakakan tindakan Manajemen Laba merupakan satu factor yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan terhadap 16 sampel Bank untuk menguji pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* yang diproksi oleh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* tahun 2005-2009. Hasil kesimpulan dengan menggunakan program AMOS sebagai berikut:

1. Kovarian atau hubungan Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai proksi *Good Corporate Governance* secara keseluruhan memiliki hubungan yang tidak nyata atau tidak ada hubungan yang signifikan dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Bank Umum Swasta Nasional *Go Public* periode 2005-2009.

Sebagaimana yang disyaratkan oleh regulator Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Pasal 5 (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen dan pasal 38 ayat 4 bahwa Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite Audit.

2. Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit tidak ada hubungan yang nyata (signifikan) atau tidak ada pengaruh terhadap perilaku manajemen laba.
3. Komisaris Independen dan Komite Audit tidak ada hubungan yang nyata (signifikan) atau tidak ada pengaruh terhadap kinerja keuangan.
4. Manajemen Laba tidak ada hubungan yang nyata (signifikan) atau tidak ada pengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

5.2 Saran

Merujuk pada beberapa kesimpulan yang telah diperoleh diatas, maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pengelola bank umum untuk referensi pengembangan konsep *Good Corporate Governance* agar ke depan industri perbankan semakin menjadi lebih baik. Sebagai lembaga intermediasi, bank umum seharusnya dapat menerapkan manajemen yang berorientasi pada *Good Corporate Governance* sehingga dapat memperkuat kelembagaan perbankan dalam tatanan Sistem Perbankan Keuangan di Indonesia.
2. Bagi regulator, Bank Indonesia tetap mengupayakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di kelembagaan perbankan nasional selalu dimonetering secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan PBI Nomor : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Karena di

masa mendatang tentu tidak dapat dihindari bahwa wilayah operasional industri perbankan nasional memasuki pasar global dimana sudah ada pesaing dengan industri perbankan asing yang memberikan layanan keuangan yang lebih baik.

3. Penelitian terhadap Manajemen Laba serta Kinerja Keuangan ini menghasilkan pengaruh yang tidak nyata. Diharapkan pada penelitian berikutnya perlu memperhatikan objek penelitian dengan mengikutsertakan bank umum nasional milik pemerintah, dan variabel eksogennya diperluas dengan variabel Direksi, dan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan indikator-indikator lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Text book:

- Ali, Masyhud, 2006, Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan dan Globalisasi Bisnis, Edisi 1, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Bagi Bank Umum, Bank Indonesia, Jakarta
- Bank Indonesia, 2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Bagi Bank Umum, Bank Indonesia, Jakarta
- Gunarianto, 2010, Profesionalisme dan Hasil Kerja Auditor Intern (Studi Terhadap Para Auditor Intern Emiten pada Sektor Manufaktur di Indonesia), Penerbit Selaras, Malang.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, Standar Akuntansi Keuangan, per 1 April 2002, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Ikatan Akuntans Indonesia, 2014, Standar Akuntansi Indonesia per Efektif 1 Januari 2015, Cetakan Pertama, Penerbit IAI
- Kieso, Donald E., et al., 2002, Akuntansi Intermediate, jilid 1, Edisi ke 10, Penerbit Erlangga.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004, Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia
- KR Subramanyam, dan John J Wild, 2010, Analisis Laporan Keuangan, "Financial Statement Analysis", Edisi 10 Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

- Rianse, Usman., dan Abdi., 2009, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Cetakan ke 2, Alfabeta, Bandung.
- Santoso, Singgih., 2011, Structural Equation Modelling (SEM), Konsep dan Aplikasi dengan AMOS 18, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Santoso, Singgih., 2014, Structural Equation Modelling (SEM), Konsep dan Aplikasi dengan AMOS 22, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Siamat, Dahlan, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi ketiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Sodik, 2009, Analisis Perilaku Investor di Bursa Efek Indonesia (Pendekatan Fundamental dan Teknikal), Cet.1, Penerbit Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cetakan Keempat, Alfabeta, Bandung.
- Sulistiawan, Dedhy et al, 2011, Creative Accounting Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sulistiyanto, Sri, 2008, Manajemen Laba Teori dan Model Empiris, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Suwardjono, 2005, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Taswan, 2003, Akuntansi Perbankan, Penerbit UPP AMP YKPN, Edisi Revisi,
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Yamin, Sofyan., et al, 2009, *SPSS Complete Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS*, Penerbit Salemba Infotek.

Journals:

Adams, Michael B; (1994) , *Agency Theory and the Internal Audit*, Auditing Journal, Vol. 9 No. 8, p. 8-12

Boediono, Gideon SB, 2005, *Kualitas laba : studi pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan dampak Manajemen laba dengan menggunakan Analisis Jalur*, SNA VIII.

Carcello, Joseph V., et al., 2006, *Audit Committee Financial Expertise, Competing Corporate Governance Mechanisms, and Earnings Management*, Juornal, p.10

Ching, Ken ML, et al., 2002, *Earning Management, Corporate Governance and the Market Performance of Seasoned Equity Offerings*, JEL

Claessens, stijn and Fan, Joseph P.H., (2002), *Corporate Governance in Asia: A Survey*, International Review of Finance, p.95

Cornett, Marcia Millon et al., 2009, *Corporate Governance and Earning Management at large US Bank Holding Companies*, Journal of Corporate Finance.

Dechow, Patricia M; et al, 2010, *Detecting Earnings Management : A New Approach*, Journal.

Demsetz, Rebbeca S, et al., 1997, *Agency Problems and Risk Taking at Banks*, Journal Banking Studies Departement Federal Reserve Bank of New York.

- Eisenhardt, Kathleen M; 1989, *Agency Theory : An Assessment and Review*, Journal Academic of Management Review, Vol 14, No. 1, p 57-74
- Fama, Eugene F; Jensen, Michael C, 1983, *Separation of Ownership and Control*, Journal of Law and Economics, The University of Chicago Press, Vol. 26, No. 2.
- Farida, Yusriati Nur, et.al, 2010, Pengaruh Penerapan *Corporate governance* Terhadap Timbulnya *Earning Management* Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 12, N0. 2, Hlm. 69-80
- Gulza, M Awais et al., 2011, *Corporate Governance Characteristics and Earnings Management: Empirical Evidence from Chinese Listed Firms*, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 1, No. 1.
- Gumanti, Tatang Ary; (2000), *Earning Management : Suatu Telaah* Pustaka, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.2, No.2 p. 104-115.
- Jensen and Meckling, 1976, *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360
- Jensen, Michael C; Fama, Eugene F, 1983, *Separation of Ownership and Control*, Journals of Law and Economics, V ol 26, No. 2.
- Katherine Schipper, 1989, *Commentary on earnings management*, Accounting Horizons, Vol. 3, Pages: 91-102.
- Klai, Nesrine; Omri, Abdelwahed, (2011), *Corporate Governance and Financial Reporting Quality : The Case of Tunisian Firms*, Vol. 4, No.1, p.158-166

- Klein, 2006, *Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management*, Journal
- Li, David D; Li, Shan; 1999, *An Agency Theory of the Bankruptcy Law*, International Review of Economics and Finance.
- Liu, Qiao et al., 2007, *Corporate Governance and Earning Management in the Chinese listed companies : A tunneling Perspective*, Journal of Corporate Finance.
- Michael C. Jensen., William H. Meckling, 1976, *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Murhadi, Werner R., 2009, *Studi Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Praktik Earnings Management pada Perusahaan Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia*, *Jurnal Manajemen Keriwausahaan*, Vol. 11, No.1 p 1-10
- Nasution, Marihot., Setiawan, Doddy., *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*, *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*
- Samani, 2008, *Pengaruh Good Corporate Governancedan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*
- Sefiana, Eka, 2009, *Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Perbankan yang telah go public di BEI*, *Jurnal*
- Ujiyantho dan Pramuka, 2007, *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*, *Simposium Nasional Akuntansi X Shen, Chung Hua et al., 2007, Earning*

- Management and Corporate Governance in Asia's Emerging Markets*, JEL.
- Sori, Muhamad Zulkarnain; Karbhari, Yusuf , Perceptions on Audit Committee and Auditor Independence in Malaysia, p.2
- Sucipto,2003, Penilaian Kinerja Keuangan, *Digitized by USU digital library 2*, www.google.com diakses tgl 19 Nopember 2011.
- Supriyatno, 2008, Pengaruh *Corporate Governance* dan Bentuk Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Di Indonesia, *Finance and Banking Journal*, Vol. 10, No. 1.
- Ujiyantho, Arief, Muhamad; et al., (2007), Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan, Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar
- Watt, Ross L; Zimmerman, Jerold L., 1978, *Toward Positive Theory of the Determination of Accounting Standards*, *Journal The Accounting Review*, Vol LIII, No. 1, January.
- Watts, Ross L., and Zimmerman, Jerold L, 1990, *Positive Accounting Theory : A Ten Year Perspective*, *Accounting Review*, Vol.5, No. 1.
- Xie, Biao, Davidson, Wallace N. and DaDalt, Peter J.,2001, *Earning Management and Corporate Governance : The Role of The Board and The Audit Committee*, JEL
- Zhou, Jian., and Chen, Ken Y, 2004, *Audit Committee, Board Characteristics and Earnings Management by Commercial Banks*, *Jurnal*